

**IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA DESAKU MENANTI TAHUN 2017-2018**  
**OLEH DINAS SOSIAL KOTA MALANG**

(Studi Dusun Baran Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1) Pada Program  
Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Peminatan Reformasi  
Pemerintahan



Oleh:

**Aldiyona Wira Fithtranto**

**NIM: 115120600111034**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**MALANG**  
**2018**

**LEMBAR PENGESAHAN****IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA DESAKU MENANTI TAHUN 2017-  
2018 OLEH DINAS SOSIAL KOTA MALANG****(Studi Dusun Baran Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang  
Kota Malang)****SKRIPSI****Disusun oleh:****Aldiyona Wira Fithtranto  
NIM: 115120600111034**

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam Ujian Komprehensif Sarjana Ilmu  
Pemerintahan pada tanggal 5 Juni 2018

**Tim Penguji:****Ketua Majelis:****Andi Setiawan, S.IP., M.Si  
NIK. 20130488708211001****Sekretaris Majelis Penguji:****Fathur Rahman, S.IP, MA  
NIK. 2011098204291001****Anggota Majelis Penguji I:****Ratnaningsih D, S.IP., M.Ec.Dev  
NIK. 20140586092112001****Anggota Majelis Penguji II:****Ruth Agnesia Sembiring S.Sos., M.A  
NIK. 2016078805142001****Malang, Juli 2018****Mengetahui:****Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik****Prof.Dr.Unti Ludigdo, Ak  
NIP. 196908141994021001**

## IDENTITAS MAJELIS PENGUJI

### 1. Ketua Majelis Penguji

Nama : Andi Setiawan,S.IP.,M.Si  
NIM : 20130488708211001  
Email : AndiS88@gmail.com

### 2. Sekertaris Majelis Penguji

Nama : Fathur Rahman, S.IP., M.A  
NIK : 2011098204291001  
Email : Fathur\_rahman@ub.ac.id

### 3. Anggota Majelis Penguji I

Nama : Ratnaningsih Damayanti,S.IP.,M.Ec.Dev  
NIK : 20140586092112001  
Email : ratnaningsih86@gmail.com

### 4. Anggota Majelis Penguji II

Nama : Ruth Agnesia Sembiring S.Sos., M.A  
NIK : 2016078805142001  
Email : ruth.sembiring@ub.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN**

Nama: Aldiyona Wira Fithtranto

NIM: 115120600111034

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul **Implementasi Program Kerja “Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosisl” oleh Dinas Sosial Kota Malang (Studi pada: Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)** adalah benar-benar merupakan karya sendiri. Beberapa hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang saya peroleh di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.

Malang, Juni 2018

Yang Membuat Pernyataan,

Aldiyona Wira Fithtranto

NIM.115120600111034

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Biodata Diri

1. Nama : Aldiyona Wira Fithtranto
2. Tempat, tanggal lahir : Malang, 8 April 1992
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Status : Belum Kawin
5. Tinggi, Berat Badan : 168 cm, 100kg
6. Agama : Islam
7. Alamat : Perumahan Pesona Cengger Ayam E 3,  
Malang, Jawa Timur
8. No. Hp : 08990347632
9. Email : Aldiwira55@yahoo.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Bina Putra (Tahun 1998-1999)
2. SD : SD Klojen 2 Malang (Tahun 1999-2005)
3. SMP : SMP Negeri 6 Malang (Tahun 2005-2009)
4. SMA : SMA Negeri 2 Malang (Tahun 2009-2011)
5. Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu  
Pemerintahan (Angkatan 2011)

### C. Pengalaman Organisasi dan Kepanitiaan

1. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan sebagai Anggota Divisi Informasi dan Komunikasi (2011-2013)
2. Perkampungan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan sebagai Panitia Penyelenggara Seksi Transportasi (2013)
3. *Leadership of Government* (LOG) sebagai Koordinasi Lapangan (2013)
4. Saiful Mujani *Riset and Consulting* (SMRC) sebagai *surveyor* atau Peneliti Lapangan (Tahun 2012)
5. Media Harian Kompas sebagai *surveyor* atau Peneliti Lapangan (Tahun 2016)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini peneliti persembahkan kepada kedua orangtua peneliti yang sejauh ini telah memberikan semangat kepada peneliti secara terus-menerus tanpa henti untuk memberikan semangat, dukungan, bimbingan, serta doanya semata-mata ditujukan untuk kelancaran dan keberhasilan peneliti dalam masa perkuliahan. Orang tua peneliti yakni Ayahanda Trie Wahjono dan Ibunda Suharlina. Tidak lupa untuk saudara peneliti yaitu Kakak peneliti Dika Manda Septriana dan adik-adik peneliti Aldo Putra Septrianto beserta Dika Putri Adetrianana. Semua jasa dan pengorbanan keluarga peneliti, maka ucapan terimakasih sebesar-besarnya peneliti ucapkan kepada keluarga. Meskipun mungkin persembahan ini tidak mampu membalas semua apa yang keluarga berikan kepada peneliti.

Malang, Juni 2018

-Aldiyona Wira Fithtranto-



**ABSTRAK****IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA DESAKU MENANTI TAHUN 2017-2018 OLEH DINAS SOSIAL KOTA MALANG****OLEH:****ALDIYONA WIRA FITHTRANTO**

Program kerja Desaku Menanti adalah program kerja yang berasal dari Kementerian Sosial RI untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis yang ada di Indonesia dengan cara rehabilitasi. Program kerja ini tidak dilaksanakan di semua kota atau kabupaten di Indonesia. Hanya Jawa Timur ada 2 kota yaitu Kota Malang dan Kota Pasuruan. Dana yang dikeluarkan Kementerian Sosial untuk pelaksanaan program kerja ini mencapai 1,8 miliar rupiah. Peneliti mengambil obyek penelitian di Kota Malang tepatnya ada di Dusun Baran Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang. Peneliti mengambil judul skripsi yaitu Implementasi Program Kerja Desaku Menanti Tahun 2017-2018 oleh Dinas Sosial Kota Malang. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program kerja Desaku Menanti yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan data-data yang didapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Landasan teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik milik George C. Edwards 4 faktor pelaksanaan kebijakan menurut Edward yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau sikap dan Struktur Birokrasi.

Dinas Sosial Kota Malang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PU dan Satpol PP Kota Malang. Tidak hanya dengan instansi pemerintah Kota Malang saja, akan tetapi dengan Bank BNI, PLN, PDAM, IAI, LSM Mutiara Insani dan Mahasiswa di Kota Malang. Kerja sama yang dijalin Dinas Sosial Kota Malang ini bertujuan untuk mensukseskan program kerja Desaku Menanti. Supaya eks gepeng yang tinggal di Desaku Menanti mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pelaksanaan program kerja ini Dinas Sosial menemui hambatan-hambatan seperti; penentuan lokasi pembangunan untuk pelaksanaan program kerja, kualitas jalan raya yang buruk, tidak ada petunjuk jalan menuju desa, rendahnya pendidikan penduduk Desaku Menanti dan rendahnya pendapatan penduduk Desaku Menanti tersebut. Cara mengatasi masalah dengan cara Dinas Sosial Kota Malang bekerja sama dengan pihak terkait. Setelah Dinas Sosial bekerja sama dengan pihak terkait akhirnya masalah-masalah yang ada dapat diselesaikan.

*Kata kunci: desaku menanti, gelandangan dan pengemis*

## ABSTRACT

### **Implementation of The Work Program Desaku Menanti Since 2017-2018 From Social Service of Malang City**

**From:  
ALDIYONA WIRA FITHTRANTO**

The work program of Desaku Menanti is a work program initiated by the Ministry of Social Affairs RI which addresses the problem of homeless and beggars in Indonesia through rehabilitation. This work program is not implemented in all cities or districts in Indonesia. Only East Java has 2 cities namely Malang and Pasuruan City. The money spent by the Ministry of Social Affairs for the implementation of this work program reached 1.8 billion rupiah. Researchers are taking the research object in the city of Malang right into Dusun Baran Kelurahan Tlogowaru Kedungkandang District. Researchers take the title of study that implementation of work programs Desaku Menanti after 2017-2018 by the Social Service of Malang City. Researchers want to know how the implementation of the work program Desaku Menanti is implemented by the Social Service.

This research uses qualitative descriptive writing method. The data source used is primary data and secondary data. The researchers use the data obtained through interviews, observations and documentation. The theoretical basis is the theory of political implementation of George C. Edwards 4 factors of political implementation according to Edward, which is communication, resources, disposition or attitude and bureaucratic structure.

Malang City Social Service in collaboration with Health Office, Education Office, Public Works and Civil Service unit Malang. Not only with the government administration of Malang City, but also with the Bank BNI, PLN, PDAM, IAI, the NGO Mutiara Insani and students in Malang City. The collaboration is being developed by Malang City Social Service to make Desaku Menanti's work program successful. So that the former people who live in my village Menanti get a better life. Implementation of this work program Social service addresses obstacles such as; the designation of development sites for the execution of work programs, poor road quality, no guidance of roads leading to the village, low education of the people of Desaku Menanti and low-income residents Desaku Menanti. How to solve the problem with Malang City Social Services in partnership with affiliated parties. After the social service works with affiliated parties, the problems can finally be solved.

*Keywords: my village is waiting, homeless and beggar*



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat karunia dan penyertaan -Nya kepada penulis sehingga karya ilmiah skripsi ini dapat disusun oleh penulis. Penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA DESAKU MENANTI KAMPUNG KESEJAHTERAAN SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL KOTA MALANG”** ini disusun untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu, di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya, Malang.

Penelitian ini dapat terlaksana atas bantuan dari banyak pihak yang telah memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran, motivasi dan dukungannya. Oleh karena itu penulis dengan setulus hati ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen pembimbing skripsi peneliti yaitu Ibu Ratnaningsih Damayanti, S.IP.,M.Ec.Dev dan Ibu Ruth Agnesia Sembiring S.Sos., M.A yang telah memberikan motivasi dan membimbing peneliti dalam penyusunan karya ilmiah skripsi ini.
2. Seluruh dosen yang ada di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan.
3. Kepala Dinas Sosial Kota Malang dan seluruh pegawai yang bekerja di Dinas Sosial Kota Malang karena telah membantu peneliti dalam mengelola data-data yang dibutuhkan peneliti untuk menyusun skripsi ini

4. Teman-teman Program Studi Ilmu Pemerintahan khususnya angkatan 2011 semua yang telah membantu penyusunan skripsi ini dan memberikan semangat.

5. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari bahwa hasil karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti terbuka untuk menerima masukan kritik dan saran dari semua pihak.

Malang, Juni 2018

Peneliti,

Aldiyona Wira Fitthtranto

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Lembar Pernyataan .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar isi .....	vi
Daftar tabel.....	vii
Daftar Bagan.....	viii
Daftar Istilah.....	ix
Abstrak.....	x
Abstract.....	xi

## BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1    Manfaat Akademis .....	13
1.4.2    Manfaat Praktis.....	13

## **BAB II Kerangka Konseptual**

2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
2.2 Kerangka Teoritis.....	19
2.2.1 Komunikasi.....	20
2.2.2 Sumber Daya.....	21
2.2.3 Disposisi atau Sikap.....	23
2.2.4 Struktur Birokrasi.....	25
2.3 Kerangka Berfikir.....	26

## **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Lokasi Penelitian.....	31
3.3 Fokus Penelitian.....	31
3.4 Jenis Data.....	32
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.5.1 Wawancara ( <i>interview</i> ) .....	34
3.5.2 Observasi.....	35
3.5.3 Dokumentasi.....	37

## **BAB IV GAMBARAN UMUM**

4.1 Gambaran Umum Program Kerja.....	39
4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Malang.....	42
4.3 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	49

## **BAB V IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA DESAKU MENANTI KAMPUNG KESEJAHTERAAN SOSIAL**

5.1 Komunikasi.....	52
5.1.1 Transmisi.....	54
5.1.2 Kejelasan.....	55
5.1.3 Konsistensi.....	56
5.2 Sumber Daya.....	58
5.2.1 Staf.....	60
5.2.2 Wewenang.....	60
5.2.3 Fasilitas.....	61
5.3 Disposisi atau Sikap.....	63
5.4 Struktur Birokrasi.....	65
5.4.1 <i>Standart Operating Procedures (SOP)</i> .....	67
5.4.2 Fragmentasi.....	72

5.5 Proses Seleksi Penduduk Desa Program Kerja “Desaku Menanti” .....	74
5.6 Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Program Kerja “Desaku Menanti” dan Penyelesaiannya.....	80
5.6.1 Hambatan Sebelum Pembangunan Perumahan Untuk Warga Binaan Dinas Sosial Program Kerja “Desaku Menanti” .....	81
5.6.2 Hambatan Pelaksanaan Program Kerja “Desaku Menanti” dan Penyelesaiannya.....	83
5.7 Hasil Penanganan Masalah di Desaku Menanti.....	87

## **BAB VI PENUTUP**

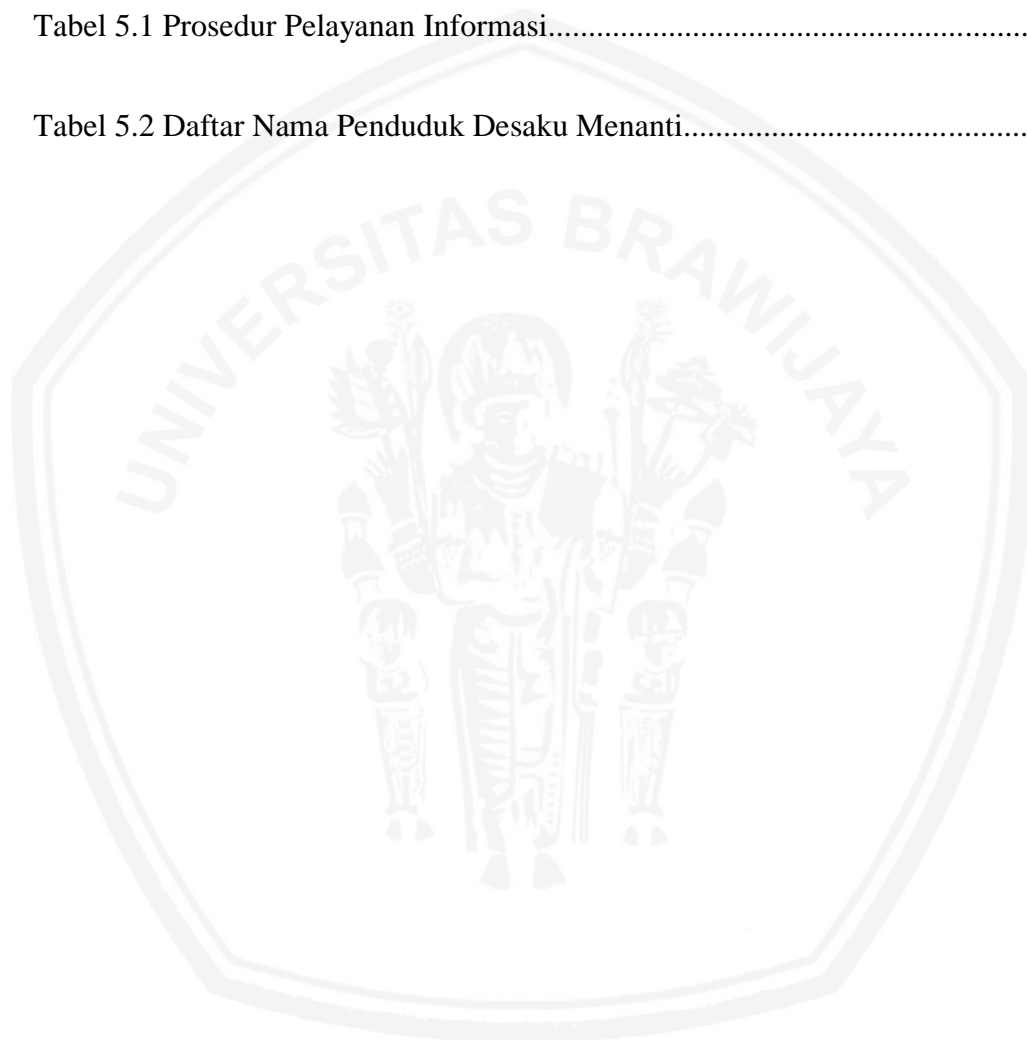
6.1 Kesimpulan.....	89
6.2 Saran.....	91

## **DAFTAR PUSTAKA**



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 3.1 Daftar Nama Informan Wawancara.....	35
Tabel 5.1 Prosedur Pelayanan Informasi.....	71
Tabel 5.2 Daftar Nama Penduduk Desaku Menanti.....	75



## DAFTAR BAGAN

2.1 Alur Pikir Penelitian .....	27
4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Malang.....	49



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan program kerja yang strategis merupakan suatu perencanaan tentang bagaimana organisasi tersebut dalam hal ini Dinas Sosial Kota Malang menerapkan sumber daya yang telah tersedia dengan seoptimal mungkin dan produk-produk/jasa apa yang akan disediakan. Adanya perencanaan yang baik dan menyangkut sekumpulan pilihan tentang bagaimana organisasi tersebut akan menerapkan sumber dayanya yang telah tersedia dan produk dan jasa apa yang akan disediakan terhadap program tindakan cenderung dirumuskan sebagai tanggapan terhadap mandat legal, tuntutan lingkungan, kesempatan atau prioritas yang ada. Program kerja “Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial” adalah program kerja yang bermula dari Kementerian Sosial yg bekerjasama dengan Pemerintah Kota Malang yang dimulai pada tahun 2015.

Program Kerja “Desaku Menanti” ini di Jawa Timur ada di 2 kota yaitu di Malang dan di Pasuruan. Mengapa di Jawa Timur ada 2 Kota, karena Pasuruan memiliki jumlah gelandangan dan pengemis terbanyak di daerah Jawa Timur sedangkan Kota Malang dengan jumlah terbanyak kedua setelah Pasuruan. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Ibu Putri salah satu staff di Dinas Sosial Kota Malang, berikut petikan wawancaranya:

“...Sesuai dengan program dari Gubernur Jawa Timur yang memiliki program yang bernama program prioritas 5 PMKS yang harus ditangani karena banyaknya jumlahnya yang banyak salah. 5 PMKS itu adalah gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik, anak jalanan dan warga tuna sosial, pada saat itu Pasuruan dan Malang mendapatkan kesempatan untuk menjalankan program tersebut dan Pasuruan Malang juga mempunyai kesiapan untuk menjalankan program tersebut”<sup>1</sup>

Awalnya setelah melakukan pendataan jumlah gelandangan dan pengemis pihak Dinas Sosial Kota Malang mengirim proposal tentang program kerja ini kepada Kementerian Sosial. Setelah mengirim proposal kepada Kementerian Sosial, akhirnya proposal tersebut disetujui oleh pihak Kementerian Sosial dan program diturunkan. Sebelum program dijalankan pihak Dinas Sosial Kota Malang melakukan seleksi terhadap gelandangan dan pengemis. Data yang diperoleh pihak Dinas Sosial Kota Malang ini didapat dari hasil razia yang dilakukan pihak Dinas Sosial Kota Malang. Data ini yang diperoleh tidak hanya dari hasil razia saja, akan tetapi hasil dari aduan masyarakat yang diterima oleh Dinas Sosial Kota Malang.

Kementerian Sosial tetap memantau perkembangan program kerja ini. Selain memantau perkembangan program kerja ini, Kementerian Sosial juga memenuhi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk mensukseskan program kerja ini agar berjalan dengan lancar dan yang terpenting tepat sasaran dan mencapai tujuan. Tujuan program ini sendiri adalah untuk mengurangi jumlah gelandangan dan

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Putri salah satu Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kota Malang pada tanggal 7 Mei 2018 pukul 10.00 WIB

pengemis di Kota Malang. Tidak hanya untuk mengurangi jumlah Gelandangan dan Pengemis saja. Akan tetapi juga membantu para Gelandangan dan Pengemis memperoleh kehidupan dan pekerjaan yang lebih baik. Penjelasan tentang program kerja Dinas Sosial Kota Malang dijelaskan oleh salah satu pegawai di Dinas Sosial Kota Malang berikut petikan wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Dinas Sosial Kota Malang:<sup>2</sup>

“..Program kerja Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial ini berawal dari program kerja dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial mempunyai program kerja untuk menampung sebagian Gelandangan dan Pengemis. Para gelandangan dan pengemis ini ditampung dan diberikan tempat tinggal beserta isinya dan diberikan modal usaha berupa uang. Bantuan uang ini dengan jumlah 14 juta per Kepala Keluarga tetapi bantuan uang ini tidak langsung diberikan 14 juta sekaligus. Tetapi 14 juta ini diberikan secara bertahap bantuan uang ini yang diberikan kepada Kepala Keluarga harus dibelikan perlengkapan dan peralatan untuk membuka usaha yang terpenting bantuan uang 14 juta ini harus bermanfaat untuk kehidupan mereka dan untuk mencari pendapatan. Sehingga mereka yang menerima bantuan uang ini tidak lagi turun ke jalan raya untuk mengemis atau mengamen lagi 14 juta ini dari bantuan modal usaha 5 juta dan uang jadup (jaminan hidup) 9 juta”

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Putri selaku pegawai Dinas Sosial Kota Malang pada tanggal 25 Januari 2017 pukul 10.00 WIB

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Sosial Kota Malang, peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu penduduk di Desaku Menanti, berikut petiakan wawancara<sup>3</sup>:

“..Benar mas saya memang mendapatkan bantuan berupa 1 unit rumah beserta isinya seperti Kursi dan Meja 1 unit. Tidak hanya mendapatkan fasilitas itu saja kami penduduk Desaku Menanti juga mendapatkan bantuan berupa uang modal usaha sebesar 5 juta dan uang jadup (jaminan hidup) 9 juta rupiah per Kepala Keluarga. Tapi bantuan uang itu tidak langsung diberikan oleh pihak Dinas Sosial Kota Malang 14 juta langsung akan tetapi diberikan secara bertahap entah itu berapa dulu pokoknya total bantuan uang yang kami dapat disini 14 juta rupiah. Uang 14 juta ini harus dibelikan peralatan atau perlengkapan untuk kami membuka usaha. Entah usaha jualan makanan dan minuman atau usaha lainnya”

Pendanaan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kota Malang ini berasal dari dana APBN dan APBD. Untuk mensukseskan program kerja ini Kemensos memberikan bantuan untuk pembangunan 40 rumah, ditambah perlengkapan rumah dan dana untuk penembangan ekonomi kreatif dengan total sebesar Rp 1,8 miliar.<sup>4</sup> Dinas Sosial Kota Malang ini mempunyai 3 Bidang didalam stuktur organisasi, antara lain yaitu bidang Rehabilitasi Sosial (RehSos), bidang Jaminan Sosial (JamSos), bidang Pemberdayaan Sosial (PemSos), dan bidang

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Kustiari salah satu penduduk Desaku Menanti pada tanggal 25 Januari 2017 pukul 14.00 WIB

<sup>4</sup> Bagian humas. “Program Desaku Menanti Kemensos Bantu Pembangunan 40 Rumah.” [www.humas.malangkota.go.id](http://www.humas.malangkota.go.id). (Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 17.56 WIB)



Perlindungan Sosial (PerSos). Semua bidang di dalam Dinas Sosial Kota Malang mempunyai tanggung jawab dan tugas masing-masing dalam melaksanakan program kerja ini untuk merealisasikan “Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial.” Akan tetapi bidang RehSos (Rehabilitasi Sosial) yang paling banyak tugas dan tanggung jawabnya untuk program kerja ini. Bidang RehSos (Rehabilitasi Sosial) ini sendiri tugas utama salah satunya adalah mengurus para Gelandangan dan Pengemis.

Beberapa pegawai di Dinas Sosial Kota Malang juga mempunyai jadwal sendiri untuk melakukan tugas di lapangan langsung. Tugas pegawai Dinas Sosial Kota Malang yang berada di lapangan ini untuk memantau kondisi lapangan secara langsung dan memantau perkembangan warga di desa tersebut. Warga di desa tersebut khususnya para gelandangan dan pengemis yang tinggal di desa. Lokasi desa ini tepatnya berada di Desa Baran Kecamatan Tlogowaru Kota Malang.

Jauhnya letak desa dari pusat perkotaan menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan perekonomian di desa tersebut. Selain jarak yang kurang strategis dan akses jalan untuk menuju desa tersebut juga sangat sulit sekali dikarenakan jalannya yang rusak menjadi penghambat orang untuk berkunjung ke desa. Awalnya Desaku Menanti ini hanya dijadikan desa untuk menampung gelandangan dan pengemis saja. Akan tetapi seiring berkembangnya jaman. Maka, Desaku Menanti ini dijadikan Desa Wisata seperti yang ada di Jodipan yaitu Kampung 3D atau Kampung Warna-Warni. Rencananya Desaku Menanti ini dijadikan Desa Wisata 1000 Topeng.

Maksud dan tujuan Desaku Menanti dijadikan Desa Wisata 1000 Topeng ini tidak lain untuk menambah pendapatan penduduk di desa tersebut karena mayoritas

pekerjaan penduduk Desaku Menanti ini sekarang adalah berjualan di rumah mereka masing-masing. Selain untuk menambah pendapatan para penduduk desa tersebut ada juga untuk menarik kelompok masyarakat agar datang ke desa dan memberikan bantuan entah itu berupa barang atau jasa. Oleh karena itu, akses jalan yang kurang baik merupakan salah satu faktor utama untuk mendukung suksesnya program kerja Desaku Menanti untuk di jadikan Desa Wisata 1000 Topeng di Kota Malang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, maka negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.<sup>5</sup>

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi; Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan

---

<sup>5</sup> Profil Dinas Sosial Kota Malang tahun 2014 hal 1

Sosial.<sup>6</sup> Fenomenal masalah kesejahteraan sosial salah satunya adalah gelandangan dan pengemis (gepeng).

Jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Malang tahun 2017 ada sebanyak 41 gelandangan (25 laki-laki dan 16 perempuan) dan sebanyak 31 pengemis (21 laki-laki dan 10 perempuan).<sup>7</sup> Gelandangan dan pengemis di Kota Malang ini sering berkeliling di lampu merah Kota Malang dan di masjid-masjid Kota Malang ketika solat Jumat atau ada kegiatan pada hari besar islam. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu penduduk yang ada di Desaku Menanti. Kebanyakan mereka sering mengemis atau mengamen di lampu merah dekat Pasar Belimbing. Penulis tertarik untuk mendalami masalah kesejahteraan sosial gelandangan dan pengemis ini. Penulis ingin meneliti kinerja pemerintahan dalam menangani kasus masalah kesejahteraan sosial gelandangan dan pengemis ini.

Malang sebagai salah satu daerah otonom dan merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya, Kota Malang memiliki wilayah seluar 11.005.66 Ha atau 110.06 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan, dengan luar wilayah Kota Malang yang menjadi kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya.<sup>8</sup> Tidak menutup kemungkinan kalau Kota Malang menjadi kota tujuan untuk urbanisasi. Selain menjadi kota terluas kedua di Jawa Timur. Kota Malang juga mempunyai predikat kota pendidikan. Dua faktor itulah yang menjadikan Kota Malang menjadi pusat urbanisasi untuk mengadu nasib di Kota Malang.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Data Gepeng dan Anjal berdasarkan razia oleh Dinas Sosial Kota Malang tahun 2017

<sup>8</sup> Profil Dinas Sosial Kota Malang tahun 2014 hal 3

Dinas Sosial Kota Malang ini menangani 27 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) antara lain yaitu:<sup>9</sup>

- a. Keluarga Fakir Miskin
- b. Anak Jalanan
- c. Tuna Susila
- d. Pengemis
- e. Gelandangan dan gelandangan Psikotik
- f. Anak Balita Terlantar
- g. Anak Berhadapan dengan Hukum
- h. Anak dengan Kedisabilitas (Tubuh, Netra, Wicara, Mental dan Cacat)
- i. Anak korban tindak kekerasan
- j. Anak perlu perlindungan khusus
- k. Lanjut Usia
- l. Penyandang Disabilitas dan Bekas Penderita
- m. Pemulung
- n. Kelompok Minoritas
- o. Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan
- p. Orang dengan HIV/AIDS
- q. Korban Penyalagunaan Napza
- r. Keluarga Rentan
- s. Korban tindak kekerasan (wanita, laki-laki, dan Lanjut Usia)
- t. Pekerja Migran Bermasalah
- u. Korban Bencana Alam
- v. Korban Bencana Sosial
- w. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
- x. Korban Bermasalah Sosial Psikologis
- y. Masyarakat daerah tertinggal dan terpencil
- z. Keluarga berumah tak layak huni.

Sebanyak 27 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial penulis fokus pada salah satu masalah kesejahteraan sosial untuk dijadikan Laporan Tugas Akhir (Skripsi). Peneliti mengambil masalah gelandangan dan pengemis untuk diteliti lebih dalam lagi. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan /atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

dan wajar. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan /atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.<sup>10</sup>

Desa yang dijadikan lahan untuk tempat tinggal eks gelandangan dan pengemis ini terletak di Kota Malang tepatnya di Dusun Baran Tlogowaru Kedungkandang. Dulunya di Dusun Baran Tlogowaru Kedungkandang ini mempunyai lahan kosong. Sebelum di Dusun Baran pembangunan perumahan untuk gelandangan dan pengemis ini akan dilakukan di daerah Wonokoyo Arjowinangun dan Pandanwangi. Tetapi di Wonokoyo, Arjowinangun dan Pandanwangi mendapatkan penolakan dari warga sekitar. Alasan penolakan tersebut adalah warga sekitar takut terjadi dampak yang negatif untuk warga asli, melihat latar belakang warga perumahan yang berasal dari gelandangan dan pengemis.

Setelah melakukan ijin ketiga tempat tersebut akhirnya pihak Dinas Sosial Kota Malang melakukan sosialisasi program kerja “Desaku Menanti” ini lebih detail lagi supaya penduduk asli bisa mengerti dampak apa saja yang akan dirasakan bukan dampak negatif saja tetapi juga ada dampak positifnya. Akhirnya pada waktu meminta ijin ke daerah Desa Baran, pihak Dinas Sosial Kota Malang mensosialisasikan segi positif dari program kerja ini. Segi positif dari program kerja ini adalah warga asli Desa Baran bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Malang, serta mendapatkan bantuan berupa sembako jika ada yang memberikan bantuan terhadap warga pendatan Desa Baran. Berikut

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

petikan wawancara peneliti dengan Ibu Putri tentang sosialisasi program kerja ini kepada penduduk asli Desa Baran:<sup>11</sup>

“...Kita mengadakan kegiatan sosialisasi kepada warga asli desa baran segi positif jika program kerja ini di bangun di daerah Desa Baran. Sala satu segi positif bagi warga penduduk asli Desa Baran adalah dari akan dibangun akses jalan yang lebih baik dan diadakan penerangan-penerangan jalan sepanjang jalan di Desa Baran.”

Selain mendapatkan penolakan dari penduduk asli dari segi lokasi pembangunan dan kesiapan penduduk asli juga sangat diperhitungkan untuk membangun perumahan bagi ekskelandangan dan pengemis. Pada akhirnya lahan kosong di Desa Baran dirasa sangat cocok dan memungkinkan untuk dibangun perumahan dan menjalankan program kerja “Desaku Menanti” tersebut dijadikan suatu lingkungan tempat tinggal eks gelandangan dan pengemis.

Pada tahun 2017 di Desaku Menanti ini terdapat 40 buah rumah yang dihuni oleh eks gelandangan dan pengemis.<sup>12</sup> Hanya sebanyak 35 unit rumah yang ditempati oleh eks gelandangan dan pengemis. Sisanya 5 unit rumah ini untuk kantor pegawai Dinas Sosial yang sedang bertugas ke Desaku Menanti, 1 unit rumah untuk gudang peralatan dan perlengkapan pembangunan, dan sisnya 3 unit rumah masih kosong belum ada yang tinggal di rumah tesebut. Fasilitas yang didapat penduduk Desaku

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Putri salah satu Staff Dinas Sosial Kota Malang pada tanggal 7 Mei 2018 pada pukul 10.00 WIB

<sup>12</sup> Data dari LKS Mutiara Insani tahun 2016



Menanti ini meliputi 1 buah rumah beserta isinya (meja, kursi, lemari pakaian dan 1 buah kasur untuk tidur).

Gelandangan ini sendiri berarti bahwa orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencahariaan dan tempat tinggal yang tetap serta menggembara di tempat umum, termasuk yang mempunyai tingkah laku aneh atau menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat serta perlu mendapatkan bantuan untuk hidup.<sup>13</sup> Sedangkan pengertian pengemis itu sendiri adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain

Adapun kriteria sendiri agar orang tersebut bisa dikatakan seorang gelandangan atau pengemis. Kriteria tersebut antara lain;<sup>14</sup>

A) Kriteria Gelandangan:

1. Tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap.
3. Tanpa penghasilan yang tetap.
4. Tanpa rencana hari depan untuk anak-anaknya maupun dirinya.

B) Kriteria Pengemis:

1. Mata pencahariannya tergantung pada belas kasih dari orang lain.
2. Berpakaian kumuh dan compang camping.
3. Berada di tempat ramai/strategis.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> *Ibid.*,

4. Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

Setelah mengetahui kriteria-kriteria Gelandangan dan Pengemis penulis menjadi lebih mudah untuk meneliti tentang kedua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Malang melalui Praktik Kerja Nyata di Dinas Sosial Kota Malang.

Walaupun pemerintah bermaksud menghilangkan keberadaan gelandangan dan pengemis, namun pemerintah tidak akan lepas tanggung jawab begitu saja. Bentuk tanggung jawab yang diberikan pemerintah yaitu melakukan upaya represif dan preventif (pencegahan). Upaya penanganan represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik mulai lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan. Sedangkan upaya preventif yaitu usaha secara terorganisi untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan.<sup>15</sup>

Berangkat dari penjabaran peneliti yang sudah peneliti jabarkan diatas tadi, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Sosial Kota Malang untuk menangani masalah gelandangan dan pengemis di Kota Malang ini supaya kehidupan eks gelandangan dan pengemis mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dan tidak lagi turun kejalan untuk mengemis atau menjadi gelandangan lagi.

---

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Pasal 1 ayat (13)

Selain itu penulis juga ingin mengetahui secara detail program kerja Desaku Menanti ini.

Penulis tertarik pada salah satu program kerja Dinas Sosial Kota Malang yaitu Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itulah, peneliti mengambil judul yaitu “**IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA DESAKU MENANTI TAHUN 2017-2018 OLEH DINAS SOSIAL KOTA MALANG.**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan program kerja Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial Kota Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Maka berdasarkan rumusan permasalahan yang diajukan peneliti tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui pelaksanaan program kerja Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial Kota Malang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, adapun manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang obyektif dan bisa memberikan gambaran atau informasi bagaimana pelaksanaan program kerja Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial Kota Malang.
- b. Mengetahui bagaimana perkembangan program kerja Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran atau tidak.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan topik penelitian dan mempraktekan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kota Malang, diharapkan memberi manfaat untuk masyarakat sekitar sehingga dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program kerja Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial Kota Malang dan melakukan perbaikan serta penyempurnaan pada program kerja tersebut.

Memberikan informasi atau kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Malang untuk melaksanakan program kerja yang sudah ada dan sudah direncanakan.

## BAB II

### KERANGKA KONSEPTUAL

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan cara peneliti untuk melihat dan menganalisis penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain agar bisa melihat perbedaan dari masing-masing peneliti sebelumnya. Fungsi dari penelitian terdahulu sebenarnya agar penelitian yang akan dilakukan mempunyai fokus masalah yang menarik untuk diteliti, selain itu dengan menganalisis penelitian terdahulu diharapkan dapat menjaga keabsahan (originalitas) sebuah penelitian. Berdasarkan penelusuran peneliti ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja yang ada di berbagai dinas kota maupun kabupaten, berikut beberapa penelitian tersebut:

Penelitian mengenai pelaksanaan program kerja telah dibagas oleh beberapa orang. Riset *pertama*, Hikmah Wati, “Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Lampung.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial terhadap fakir miskin perkotaan di Provinsi Lampung. Selain tujuan tersebut ada tujuan lagi yaitu untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan penanggulangan penyaluran bantuan terhadap miskin perkotaan di Provinsi Lampung. Hasil dari penelitian ini peran Dinas Sosial di Provinsi Lampung sebagai representasi asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan

dari pemerintah pusat (Kementerian Sosial) kepada pemerintah daerah (Dinas Sosial).

Faktor penghambat pelaksanaan penyaluran bantuan minimnya pengetahuan anggota KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Provinsi Lampung dalam pembuatan rekening untuk kepentingan bersama yang menghabiskan waktu yang cukup lama. Lalu faktor bahasa merupakan faktor penghambat juga saat sosialisasi dan evaluasi anggota KUBE kepada masyarakat kebanyakann masyarakat masih menggunakan bahasa suku dan daerah masing-masing.

*Kedua*, Faizurah Ahmad, “Efektifitas Kerja Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.” Penelitian ini untuk menganalisa efektivitas kerja pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang indikator-indikator pengekuruannya adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri pegawai, prestasi kerja dan kepuasan kerja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kemampuan menyesuaikan diri pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan adalah cukup efektif dilihat dari 6 pertanyaan jawaban setuju persentasenya cukup besar. Selain itu prestasi kerja pegawai Dinas Sosial ini cukup efektif juga dilihat dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti ini.

*Ketiga*, Iis Sudiyan, “Pemberdayaan Masyarakat (Gelandangan dan Pengemis) dalam Bidang Keterampilan Pengolahan Kedelai di Panti Bina Karya Panghudi Luhur Bekasi.” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang bagaimana proses pemberdayaan gelandangan dan pengemis dalam program keterampilan pengolahan kedelai dan untuk mengetahui hasil dari



pemberdayaan gelandangan dan pengemis di PSBK. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan gelandangan dan pengemis di PSBK ini sangat baik terlihat dari adanya rencana yang matang sebelum adanya pemberdayaan.

*Keempat*, Fadhlani Sultoni, “Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program.”

Penelitian ini fokus pada evaluasi hasil kerja dalam melaksanakan program kerja dan penelitian ini dilakukan pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa pelaksanaan program kerja pada BPKP ini cukup efektif dikarenakan pencapaian program kerja BPKP yang sesuai dengan rencana.

*Kelima*, Nitha Chitrasari, “Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cilegon.” Penelitian ini membahas tentang faktor penghambat kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon. Penelitian ini menyebutkan kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon untuk menangani gelandangan dan pengemis dikatakan masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan terkendala oleh belum tersedianya panti rehabilitasi serta sarana dan prasarana untuk menangani mereka supaya menjadi masyarakat yang mandiri. Untuk meningkatkan kinerja, Dinas Sosial Kota Cilegon perlu membangun panti rehabilitasi agar program-program yang dibuat bisa menjadi lebih efektif sehingga dapat mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Cilegon.

**Tabel 2.1**

**Hasil Penelitian Terdahulu**

Nama dan Tahun	Penelitian	Metode	Hasil	Titik Pembeda
----------------	------------	--------	-------	---------------

Hikmah Wati (2016)	Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Lampung	Deskriptif Kualitatif	Peran Dinas Sosial di Provinsi Lampung sebagai representasi asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusan (Kementerian Sosial) kepada pemerintah daerah (Dinas Sosial)	Pada penelitian sebelumnya yaitu menjelaskan peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial sedangkan dalam penelitian ini fokusnya pada pelaksanaan program kerja oleh Dinas Sosial
Faizurah Ahmad (2014)	Efektifitas Kerja Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	Deskriptif Kualitatif	Kemampuan menyesuaikan diri pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan adalah cukup efektif dalam melaksanakan tugas pegawai.	Pada penelitian sebelumnya yaitu menjelaskan efektifitas kerja pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan pada penelitian ini fokusnya pada pelaksanaan program kerja oleh Dinas Sosial yang di tugaskan kepada seluruh pegawai Dinas Sosial Kota Malang
Iis Sudiyanti (2016)	Pemberdayaan Masyarakat (Gelandangan dan Pengemis) Dalam Bidang Keterampilan Pengolahan Kedelai di Panti Bina Karya Panghudi Luhur Bekasi.	Deskriptif Kualitatif	Pemberdayaan gelandangan dan pengemis di PSBK ini sangat baik terlihat dari adanya rencana yang matang sebelum adanya	Pada penelitian sebelumnya yaitu menjelaskan pemberdayaan Gepeng di bidang keterampilan sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada pemberdayaan Gepeng dalam

			pemberdayaan	program kerja Desaku Menanti oleh Dinas Sosial.
Fadhlan Sultoni (2013)	Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan program kerja pada BPKP ini cukup efektif dikarenakan pencapaian program kerja BPKP yang sesuai dengan rencana.	Pada penelitian sebelumnya membahas tentang evaluasi pelaksanaan program kerja BPKP sedangkan pada penelitian ini membahas tentang proses pelaksanaan program kerja Desaku Menanti oleh Dinas Sosial.
Nitha Chitrasari (2013)	Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cilegon	Deskriptif Kualitatif	Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon masih belum efektif dikarenakan belum adanya tempat rehabilitasi pada gelandangan dan pengemis	Pada penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon kurang efektif dikarenakan belum adanya tempat rehabilitasi untuk Gepeng sedangkan penelitian ini fokus pada pelaksanaan program kerja Desaku Menanti program rehabilitasi khusus untuk Gelandangan dan Pengemis

Sumber: Hasil olahan peneliti, tahun 2017

## 2.2 Kerangka Teoritis

Berbagai definisi tentang kebijakan publik telah banyak diperbincangkan dalam berbagai kepustakaan. Menurut Abdul Wahab ada 2 (dua) pandangan para ahli mengenai definisi kebijakan publik itu sendiri. *Pertama*, mengidentikan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>1</sup> Jadi

<sup>1</sup> Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: UMM Press, 2011), hlm: 45

pandangan pertama ini berpendapat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya dapat dikatakan sebagai kebijakan publik. *Kedua*, pandangan yang memusatkan perhatian pada implementasi kebijakan publik.<sup>2</sup> Pandangan ini melihat bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan atau tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan memiliki akibat dan dampak. Begitu banyak studi kepustakaan yang menulis tentang kebijakan publik, penulis memutuskan untuk menggunakan teori implementasi kebijakan publik milik George C. Edwards karena dirasa paling cocok untuk digunakan dalam penelitian.

George C. Edward menyampaikan dua pertanyaan penting mengenai implementasi kebijakan yaitu, prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan dapat berhasil? Dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal?<sup>3</sup> Edward berusaha menjawab pertanyaan tersebut menggunakan 4 (empat) variabel yaitu komunikasi, sumber daya, tingkah laku, dan struktur birokrasi. Oleh sebab itu, diperlukan analisis mendalam mengenai empat variabel tersebut agar dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Edward.

### 2.2.1 Komunikasi

Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: MedPress, 2008), hlm: 174

kebijakan tersebut.<sup>4</sup> Menurut George C. Edward seperti yang dikutip dari Winarno ada tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

1. Transmisi adalah sebelum pejabat dapat mengimplementasikan keputusan, harus disadari bahwa suatu keputusan telah dibuat oleh pejabat tersebut. Hal ini tidak semata-mata proses langsung sebagaimana nampaknya, tetapi dalam prosesnya banyak ditemukan bahwa keputusan-keputusan terabaikan dan sering terjadi kesalahan pemahaman terhadap keputusan yang telah dikeluarkan.
2. Kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan harus jelas. Oleh sebab itu dibutuhkan kejelasan dalam mengkomunikasi kebijakan
3. Konsistensi, Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung secara efektif maka perintah pelaksanaan harus berjalan dengan konsisten dan jelas. Sehingga dapat memudahkan para pelaksana mengimplementasikan kebijakan dengan baik.<sup>5</sup>

Dengan menyelidiki hubungan antara komunikasi dan implementasi, maka kita dapat mengambil kesimpulan, yakni semakin cermat keputusan dan perintah pelaksanaan diteruskan kepada mereka yang melaksanakannya, maka semakin tinggi tingkat probabilitas keputusan dan perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan.

### 2.2.2 Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu variabel menurut Edward, karena sumber daya merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Jika dalam implementasi suatu kebijakan

---

<sup>4</sup> Riza Agustine, *Implementasi Upah Minimum Kota Pekanbaru Tahun 2013*, Jom FISIP, Vol. 1, No.2, (Oktober 2014) hlm: 3

<sup>5</sup> Budi Winarno, *Op.Cit*, hlm: 177

kekurangan sumber daya maka kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut meliputi beberapa hal yaitu :

1. Staf

Jumlah staf berpengaruh pada efektifitas suatu kebijakan dan kecakapan harus dimiliki pegawai pemerintahan.<sup>6</sup> Staf yang ada juga harus memiliki kemampuan profesional sesuai dengan bidangnya, sehingga keahlian yang dimiliki dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan keudukannya

2. Wewenang

Wewenang pelaksana dalam implementasi kebijakan akan berbeda-beda dari satu program dengan program lainnya.<sup>7</sup> Misalnya seperti surat pemanggilan, surat perintah kepada pejabat dan lain sebagainya.

3. Fasilitas

Fasilitas merupakan sumber yang cukup penting dalam implementasi. Fasilitas fisik dan infrastruktur yang baik akan mendukung terlaksananya suatu kebijakan.<sup>8</sup> Contohnya, jika staf dan wewenang yang ada sudah cukup baik dan kongkrit, maka fasilitas yang tidak memadai akan membuat implementasi kebijakan terhambat atau bahkan tidak terlaksana.

Suatu kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik, dengan tidak adanya sumber daya yang memadai maka kebijakan tersebut hanya menjadi sebuah

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm: 182

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm: 185

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm: 188



rencana dan tidak akan teralisasi. Oleh karena itu, sumber daya merupakan salah satu faktor yang krusial dalam implementasi kebijakan

### 2.2.3 Disposisi atau Sikap

Disposisi merupakan salah satu variabel yang dikemukakan oleh Edward. Jika pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan, hal itu mengartikan adanya dukungan, dan kemungkinan besar para pelaksana akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Edward mengatakan bahwa banyak kebijakan yang masuk kedalam “zona ketidakacuhan.” Ada kebijakan yang berjalan efektif karena mendapat dukungan dari pelaksana dan ada yang berjalan tidak efektif karena tidak mendapat dukungan dari pelaksana karena bertentangan dengan kepentingan pribadi atau kelompok.<sup>9</sup> Pelaksana mempunyai keleluasaan yang besar dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan. Jika pelaksana diminta melaksanakan perintah yang mereka tidak inginkan, maka pelaksana tersebut akan menggunakan keleluasaan dan kadang-kadang dengan cara halus untuk menghambat implementasi

Para pelaksana memegang peran yang cukup penting dalam implementasi kebijakan. Maka dari itu sikap para pelaksana harus sebaik mungkin mendukung kebijakan yang telah dibuat. Jika tidak maka kecenderungan para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan terhadap implementasi kebijakan. Para pelaksana harus menghindari kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm: 194

sehingga kebijakan yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan tujuan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.<sup>10</sup> Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program.

Selain itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm: 196

#### 2.2.4 Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu aspek yang paling penting karena secara keseluruhan menjadi pelaksana suatu kebijakan. Pada dasarnya, para pelaksana tentu mengetahui apa yang harus dilakukannya serta sumber daya untuk melakukannya, tetapi dalam pelaksanaannya terhalang dengan struktur organisasi yang ada. Menurut Edward dikutip dari Winarno ada dua karakteristik utama birokrasi, yaitu :

1. *Standart Operating Procedures (SOP)*

Standart operasional prosedur merupakan tolak ukur dasar yang berupa prosedur-prosedur dalam menanggulangi keadaan umum yang digunakan dalam organisasi-oraganisasi publik atau swasta.<sup>11</sup> SOP dapat menyamaratakan segala tindakan yang dilakukan oleh para birokrat sesuai dengan tugasnya masing-masing. Keberadaan SOP juga membantu di dalam menentukan batas kerja setiap pelaksana dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Tetapi SOP juga sangat mungkin untuk menghalangi suatu implementasi kebijakan yang membutuhkan cara-cara baru atau tipe personil baru dalam melaksanakan suatu kebijakan, hal ini terjadi karena SOP yang sudah tidak relevan dengan kebijakan yang ada sekarang. Tetapi disamping itu manfaat SOP juga cukup besar, organisasi dengan prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm: 204

besar atas program-program yang luwes mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru ketimbang birokrasi-birokrasi tanpa punya ciri-ciri seperti ini.<sup>12</sup>

## 2. Fragmentasi

Fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan di luar unit organisasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintahan.<sup>13</sup>

Implementasi kebijakan merupakan proses yang cukup rumit, namun implementasi memegang peranan yang cukup vital dalam terselenggaranya suatu kebijakan. Empat variabel tersebut diungkapkan Edward untuk mengetahui bagaimana variabel-variabel ini mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Jadi dapat diketahui kendala-kendala yang timbul di dalam implementasi kebijakan dan membuka kesempatan untuk memperbaikinya dimasa yang mendatang.

### 2.3 Kerangka Berfikir

Untuk memudahkan jalannya penelitian maka peneliti membuat alur berpikir. Alur pikir adalah sebuah alat dalam penelitian ini agar dapat memudahkan dalam proses penelitian mulai dari mencari data, menganalisis data, dan menuliskan hasil penelitian. Ditinjau dari beberapa data, latar belakang, dan

---

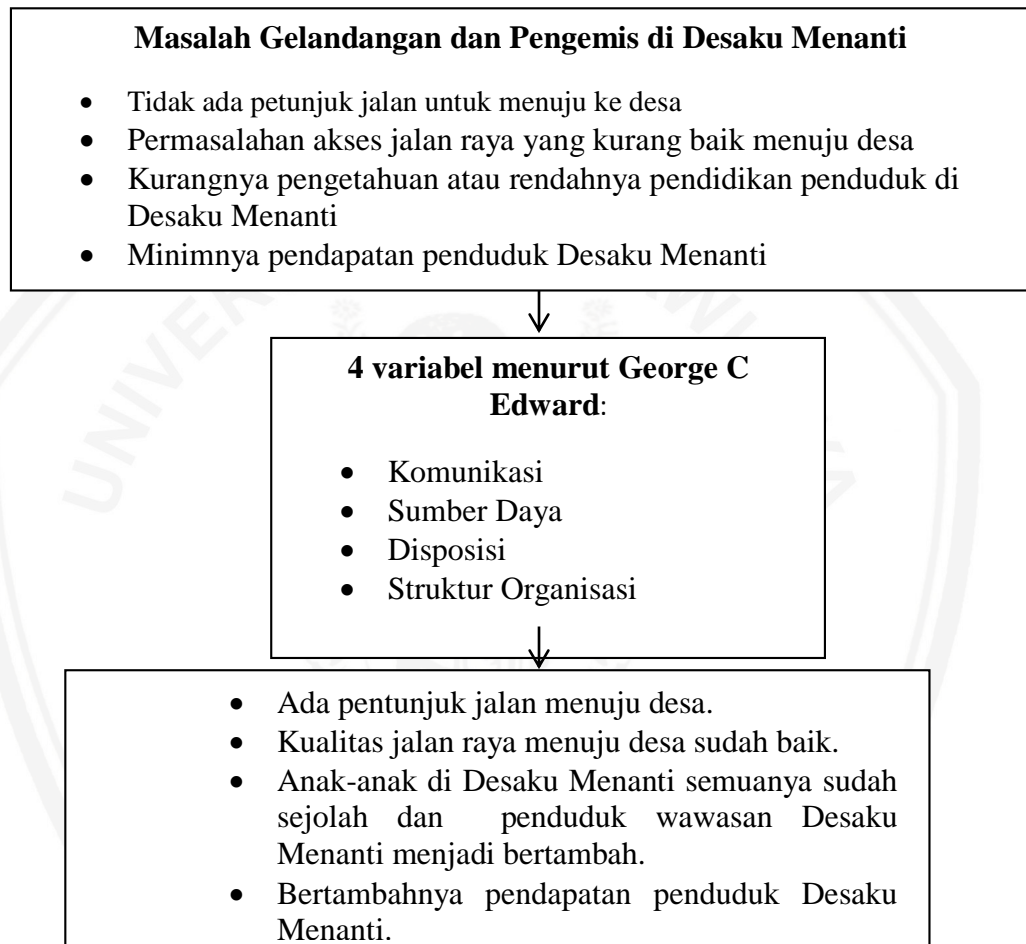
<sup>12</sup> *Ibid*, hlm: 206

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm: 203

konsep yang digunakan dalam penelitian maka peneliti membuat alur pikir sebagai berikut :

**Bagan 2.1**

**Alur Pikir Penelitian**



*Sumber: Diolah oleh peneliti Tahun 2017*

Pada Bagan 2.1 masalah yang timbul di Desaku Menanti ini bisa diatasi oleh pihak Dinas Sosial Kota Malang jika 4 variabel menurut George C. Edward dipenuhi oleh Pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Sosial Kota Malang. Empat variabel digunakan Edward untuk menjawab pertanyaan yang muncul sesuai dengan peneliti yang sudah dijelaskan di atas. Jadi jika Dinas Sosial Kota Malang bisa menggunakan

4 variabel tersebut tidak menutup kemungkinan masalah-masalah yang ada di Desaku Menanti bisa teratasi dengan baik. Tidak hanya mengatasi masalah yang ada di Desaku Menanti saja akan tetapi juga mengatasi masalah gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran di jalanan Kota Malang.

Menurut peneliti 4 variabel tersebut sangat berhubungan dan butuh dukungan dari variabel-variabel lainnya. Empat variabel tersebut menurut peneliti sangat berhubungan satu dengan yang lainnya. Butuh komunikasi yang baik antara birokrasi dengan fokus sasaran kebijakan. Akan tetapi, butuh juga sumber daya untuk menunjang suksesnya program kerja sesuai dengan tujuan program kerja tersebut. Setelah semua variabel berjalan dengan efektif pelaksanaan kebijakan atau program kerja akan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat oleh kesepakatan pelaksana program kerja.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Pada penulisan ini, peneliti menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif. Metode ini didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia<sup>1</sup>. Definisi tersebut merupakan beberapa kata kunci dalam riset kualitatif, yaitu: proses, pemahaman, kompleksitas, interaksi, dan manusia. Proses dalam melakukan penelitian merupakan penekanan dalam riset kualitatif. Oleh karena itu, dalam melaksanakan penelitian, penelitian ini lebih fokus pada proses dari pada hasil akhir. Proses memerlukan waktu dan kondisi yang berubah-ubah maka definisi riset ini akan berdampak pada desain riset dan cara-cara dalam melaksanakannya yang juga berubah-ubah atau bersifat fleksibel.

Penelitian kualitatif ini peneliti membaur menjadi satu dengan yang diteliti sehingga peneliti dapat memahami persoalan dari sudut pandang yang diteliti itu sendiri.<sup>2</sup> Sasaran penelitian kualitatif ini adalah manusia karena manusialah sumber masalah dan sekaligus penyelesai masalah. Sekalipun demikian, penelitian kualitatif tidak hanya membatasi penelitian terhadap manusia saja. Sasaran lain dapat berupa kejadian, sejarah, benda berupa foto, arefak, peninggalan-peninggalan peradaban

---

<sup>1</sup> Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006  
hlm 193

<sup>2</sup> *Ibid.*,

kuna dan lain sebagainya. Intinya sasaran penelitian kualitatif ini ialah manusia dengan segala kebudayaan dan kegiatannya.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan pencarian data di lapangan, maka seorang peneliti kualitatif dituntut untuk secara jeli mengumpulkan data-data yang ada di lapangan penelitian. Hal ini sering sekali menyulitkan karena tidak setiap permasalahan penelitian yang menarik dan signifikan, sehingga pemilihan informan atau narasumber cukup penting dalam penelitian kualitatif. Informan yang diminta informasi harus benar-benar paham dan mengerti tentang topik yang sedang diteliti, informan tersebut biasa disebut sebagai informan kunci (*key informans*) yakni, informan yang dipilih dari orang-orang yang benar-benar mengetahui beberapa permasalahan yang akan diteliti. Peneliti juga harus mengumpulkan data bergerak dari informan satu keinforman lainnya sampai data dianggap selesai terkumpul, ini sering disebut *snow ball*, karena bergerak seperti bola salju yang bergerak menggelinding makin besar.<sup>4</sup>

Maka dari itu hasil dari penelitian kualitatif ini dapat dijadikan sebagai pedoman penelitian-penelitian yang akan datang selama penelitian tersebut tidak jauh beda dengan penelitian ini, karena penelitian kualitatif mencermati setiap proses, perilaku aktor, dan segala aspek yang terjadi di lapangan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Aunu Rofiq, *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Ilmiah Pawiyatan, Vol.20, No. 1, (maret 2013), hlm: 84

### 3.2 Lokasi Penelitian

Pada penulisan ini, peneliti melakukan penelitian lokasi di Desa Baran, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Lokasi tersebut sangat sulit dijangkau jika menggunakan kendaraan roda 4 dikarenakan akses jalan untuk menuju desa ini sangat rusak. Bisa saja diakses oleh kendaraan roda 4 akan tetapi harus berhati-hati selain akses jalan yang rusak lebar akses jalan menuju lokasi ini juga sangat sempit jika dilalui oleh roda 4 secara bersamaan.

Desa Baran ini adalah salah satu lokasi yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan program kerja “Desaku Menanti” ini. Selain luas lahan yang memenuhi kriteria dari Kementerian Sosial, di desa ini letaknya juga sangat sejuk karena letak desa ini berada dataran yang tinggi. Maka dari itu akses menuju desa ini banyak melalui hutan-hutan akan tetapi masih banyak penduduknya. Selain kondisi alam yang sangat memungkinkan untuk melaksanakan program kerja ini. Penduduk asli Desa tersebut juga mau menerima adanya pembangunan perumahan untuk eks gelandangan dan pengemis.

### 3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berfokus pada pelaksanaan program kerja Dinas Sosial Kota Malang yang bernama “Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial”. Program kerja ini fokus pada penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya gelandangan, pengemis dan pemulung. Program kerja yang bermula pada Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan pihak Pemerintah Kota Malang. Sesuai dengan Surat Keputusan Pemerintah Daerah (SKPD) dinas

yang menangani tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah Dinas Sosial. Maka dari itu sesuai SKPD Pemerintah Kota Malang memberikan wewenang untuk melaksanakan program kerja Desaku Menanti ini.

Fokus peneliti disini ada pada pelaksanaan program kerja oleh Dinas Sosial Kota Malang. Untuk itu perlu diketahui proses pelaksanaan program kerja ini dan kendala-kendala Dinas Sosial Kota Malang dalam menangani gelandangan dan pengemis.

### **3.4 Jenis Data**

Jenis data yang dipakai peneliti dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen, keterangan-keterangan baik lisan maupun tertulis, pemikiran dan hasil interpretasi. Sumber data berasal dari:

1. Data Primer, adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi)<sup>5</sup>. Data primer yang dimaksud disini adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dai sumber sebenarnya. Sumber ini bisa berasal dari wawancara pihak Dinas Sosial Kota Malang dan gelandangan pengemis yang ada di Desaku Menanti.

---

<sup>5</sup> Achmad.Maulidi. "Pengertian data primer dan data sekunder." *www.kanalinfo.web.id* (diakses pada tanggal 1 Desember 2017 pukul 13.27 WIB)

2. Data Sekunder, adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.<sup>6</sup> Data sekunder yang dimaksud disini adalah data-data yang diperoleh melalui dokumen dan arsip yang dimiliki pihak Dinas Sosial Kota Malang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pihak-pihak yang bekerja sama dalam melaksanakan program kerja Desaku Menanti.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data tentu membutuhkan teknik pengumpulan data agar data yang dikumpulkan sesuai dengan fokus penelitian. Instrumen pengumpulan data juga perlu disesuaikan dengan sumber dari mana data itu akan diperoleh, dan disesuaikan juga dengan bagaimana metode data itu diperoleh.<sup>7</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti disini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan peneliti kepada pihak Dinas Sosial Kota Malang, LSM yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Malang dan para penduduk di Desaku Menanti. Penduduk Desaku Menanti ini adalah penduduk yang semuanya eks gelandangan dan pengemis. Sedangkan observasi ini dilakukan peneliti langsung terjun ke lapangan obyek penelitian yaitu di Desa Baran Tlogowaru

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Sanapiah Faisal, *Format-format penelitian sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm: 113

Kota Malang. Desa tersebut adalah desa yang digunakan untuk rehabilitasi gelandangan dan pengemis yang ada di program kerja Dinas Sosial Kota Malang bernama “Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial.”

Maka dari itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### **3.5.1 Wawancara (*interview*)**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.<sup>8</sup> Secara ringkas wawancara dapat diartikan sebagai pertanyaan yang diajukan secara lisan. Dalam wawancara terdapat pewawancara (pengejar informasi) dan yang diwawancarai (informan). Pewawancara bertugas untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan meminta penjelasan dengan menggali informasi sedalam-dalamnya kepada informan.<sup>9</sup> Dalam sebuah wawancara, pengumpul data harus menggunakan pedoman wawancara yang harus benar-benar dimengerti oleh pewawancara, sebab dialah yang akan menyakan dan menjelaskannya kepada informan.<sup>10</sup>

Informan penelitian merupakan salah satu hal yang cukup penting agar penelitian dapat diselesaikan dengan baik. Maka peneliti menentukan informan untuk dilakukan wawancara yakni sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm: 63

<sup>10</sup> Sanapiyah Faisal, *Op.Cit*, hlm: 52



**Tabel 3.1**  
**Daftar Nama Informan Wawancara**

No.	Nama.	Jabatan.
1.	Ibu Sri Wahyuningtias	Kepala Dinas Sosial Kota Malang
2.	Ibu Kus	Kabid Rehabilitasi Sosial
3.	Ibu Josephin	Kasi Pemberdayaan
4.	Ibu Putri	Staff Dinas Sosial bagian Pekerja Sosial
5.	Ibu Nola	Staff Dinas Sosial Pekerja Sosial
6.	Bapak Udin	Staff Dinas Sosial bagian Pekerja Sosial
7.	Bapak Arifin	Staff Dinas Sosial bagian Transportasi
8.	Ibu Kustiari	Penduduk di Desaku Menanti (eks pengemis)
9.	Ibu Sumiarti	Penduduk di Desaku Menanti (eks gelandangan)

*Sumber: Hasil olahan penulis tahun 2017*

Penulis wawancara dengan beberapa informan diatas tersebut. Pengambilan informan diatas bukan tanpa alasan, akan tetapi pengambilan informan tersebut sesuai dengan tugas masing-masing informan yang masih ada kaitannya dengan judul peneliti yaitu tentang pelaksanaan program kerja “Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial” oleh Dinas Sosial Kota Malang. Menurut peneliti informan tersebut sangat cocok untuk diwawancarai karena informan tersebut paham dan mengerti tentang program kerja Desaku Menanti ini.

### **3.5.2 Observasi**

Observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian, apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Agar memberikan data yang akurat dan bermanfaat, observasi sebagai metode ilmiah harus dilakukan oleh peneliti yang sudah melewati latihan-latihan yang memadai, serta telah mengadakan persiapan yang teliti dan lengkap (Patton Amheru).<sup>11</sup> Metode observasi adalah metode

<sup>11</sup> Amheru. *Teknik Pengumpulan Informasi Data Penelitian Kualitatif 20i5*. Skripsi

menggunakan alat mengamatan atau pengindraan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, dan perilaku.<sup>12</sup>

Menurut ilmu psikologi disebutkan bahwa observasi, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan itu adalah amatan langsung.<sup>13</sup> Oleh karena itu dengan menggunakan metode observasi ini diharapkan peneliti akan lebih memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh).<sup>14</sup>

Dalam konteks observasi ini peneliti melihat secara langsung pelaksanaan program kerja Desaku Menanti langsung terjun ke lapangan yaitu di Desa Baran Tlogowaru Kota Malang. Peneliti mengamati kinerja pegawai Dinas Sosial Kota Malang yang ditugaskan di Desaku Menanti. Selain mengamati kinerja pegawai Dinas Sosial Kota Malang. Peneliti juga mengamati aktifitas keseharian penduduk di Desaku Menanti. Tidak hanya mengamati kinerja pegawai Dinas Sosial dan aktifitas keseharian penduduk Desaku Menanti. Tetapi peneliti juga mengamati kendala-kendala apa saja yang dialami penduduk di Desaku Menanti, sehingga peneliti bisa membantu menyampaikan kendala mereka kepada pihak terkait.

---

<sup>12</sup>Sanapiah Faisal, *Format-format penelitian sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm: 52

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto. 2006. *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 133

<sup>14</sup> M. Djunaidi Ghony, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar –Ruzz Media. Hal 175

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumen dapat dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian.<sup>15</sup> Dokumen disini meliputi materi atau bahan seperti: fotografi, video, film, memo, surat, diary, rekaman kasus klinis dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang, dan sebagai bagian yang berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok berasal dari hasil observasi dan wawancara mendalam.<sup>16</sup> Melalui teknik dokumentasi ini peneliti mengambil foto-foto di Desaku Menanti. Foto-foto ini tentang lingkungan Desaku Menanti dan aktifitas keseharian pegawai Dinas Sosial Kota Malang dan penduduk di Desaku Menanti. Untuk masalah surat peneliti mengumpulkan surat-surat yang peneliti dapatkan untuk melakukan wawancara ke pihak Dinas Sosial Kota Malang dan penelitian di Desaku Menanti maupun surat dari Perguruan Tinggi.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> *Ibid.*,

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

Bab ini membahas sekilas tentang gambaran umum dan pemetaan aktor yang melaksanakan program kerja “Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial” di Kota Malang. Bab ini membahas lebih jauh lagi tentang program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Malang. Di mana membahas tentang bagaimana cara pengambilan data untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti.

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan sekilas tentang program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Malang, yang mana penelitian ini fokus pada bagaimana cara Dinas Sosial Kota Malang mengelola tempat tinggal untuk gelandangan dan pengemis yang sudah disaring oleh Dinas Sosial Kota Malang sesuai syarat yang ada. Pada sub bab–sub bab ini menjelaskan tentang kondisi tempat tinggal gelandangan dan pengemis yang telah disediakan oleh Dinas Sosial Kota Malang. Subbab ni juga menjelaskan aktor –aktor yang terlibat dalam pengelolaan tempat tinggal gelandangan dan pengemis.

Aktor–aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program kerja ini meliputi Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pemerintah Kota Malang, Dinas Sosial Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang, Ikatan Akuntansi Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat Mutiara Insani, Satpol PP. Para aktor ini mempunyai tugas masing-masing untuk melaksanakan program kerja ini. Tugas para aktor ini sesuai

dengan kebutuhan yang dibutuhkan di lingkungan tempat tinggal gelandangan dan pengemis.

### **1.1 Gambaran umum Program Kerja “Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan”**

Subbab ini sekilas menjelaskan tentang program kerja ini. Program kerja “Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial” adalah program kerja yang bermula dari Kementerian Sosial yg bekerjasama dengan Pemerintah Kota Malang yang dimulai pada tahun 2015. Program Kerja “Desaku Menanti” ini di Jawa Timur ada di 2 kota yaitu di Malang dan di Pasuruan. Mengapa di Jawa Timur ada 2 Kota, karena Pasuruan memiliki jumlah gelandangan dan pengemis terbanyak di daerah Jawa Timur sedangkan Kota Malang dengan jumlah terbanyak kedua setelah Pasuruan. Tempat desa ini terletak di Dusun Baran Kecamatan Tlogowaru Kota Malang, akan tetapi pihak Kemensos tidak lepas tangan begitu saja. Tetap pihak Kemensos memantau perkembangan program kerja ini.

Tidak hanya memantau saja, akan tetapi Kemensos juga ikut membantu untuk melaksanakan jalannya program kerja ini dengan cara memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan pihak Dinas Sosial Kota Malang untuk diberikan kepada warga di desa. Warga yang tinggal di desa tersebut semuanya bekas gelandangan dan pengemis di Kota Malang. Mereka dulu terkena razia di jalanan oleh pihak Dinas Sosial Kota Malang yang bekerja sama dengan pihak Satpol PP.

Setelah terkena razia mereka semua didata dan ditawarkan tempat tinggal di desa. Tidak hanya mendapatkan tempat tinggal saja, akan tetapi juga mendapatkan

pelatihan-pelatihan khusus dan bantuan berupa sejumlah uang yang mana uang tersebut untuk modal mereka membuka usaha sendiri. Pelatihan-pelatihan ini berupa pelatihan memasak seperti membuat bumbu dapur, membuat kue dan pelatihan ketrampilan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pelatihan ini tidak hanya untuk bapak-bapak atau ibu-ibu saja, akan tetapi ada juga pelatihan bagi anak-anak warga Desaku Menanti tersebut. Pelatihan untuk anak-anak yaitu pelatihan menari tradisional, pelatihan musik, pelatihan membuat topeng malangan dan mengecat topeng.

Setelah mereka setuju dengan menempati tempat tinggal yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Malang dan bantuan-bantuan berupa uang tunai dengan catatan mereka tidak boleh lagi turun ke jalanan untuk mengemis atau mengamen. Pelatihan ini ditujukan bukan hanya kepada orang dewasa saja, tetapi kepada anak-anak yang tinggal di desa tersebut. Pelatihan kepada orang dewasa ini lebih ditujukan pelatihan tentang cara pembuatan kue dan motivasi agar mereka bersemangat dan tidak turun ke jalanan lagi. Sedangkan pelatihan untuk anak-anak lebih diutamakan terhadap pengembangan bakat dan minat mereka masing-masing. Pelatihan terhadap anak-anak di desa ini meliputi pelatihan bermain alat musik, pelatihan tari tradisional dan pembuatan topeng.

Jika mereka sudah menyetujui komitmen untuk tinggal di desa seluruh warga eks gelandangan dan pengemis binaan Dinas Sosial Kota Malang harus mengikuti aturan yang dibuat oleh pihak Dinas Sosial Kota Malang. Aturan tersebut sangat mudah dan simpel sekali yaitu mereka tidak boleh lagi turun ke jalanan lagi untuk mengemis atau memulung. Jika mereka ketahuan turun ke jalanan lagi untuk



mengemis dan memulung mereka akan mendapatkan teguran dari Dinas Sosial Kota Malang. Teguran ini sebanyak 2x teguran jika mereka ketahuan turun ke jalanan lagi. Jika ketiga kalinya mereka ketahuan turun ke jalanan untuk mengemis dan memulung maka sesuai dengan perjanjian awal. Hak-hak mereka menjadi warga Desa Baran binaan Dinas Sosial Kota Malang akan di cabut.

Hak-hak untuk warga binaan Dinas Sosial Kota Malang ini adalah hak untuk mendapatkan rumah beserta isinya dan bantuan uang tunai dari UEB (Usaha Ekonomi Bersama) dan Jadup (Jaminan Hidup). Bantuan UEB ini berupa uang tunai 5 juta rupiah dan bantuan Jadup ini berupa uang tunai 9 juta rupiah yang akan di berikan kepada seluruh Kepala Keluarga warga Desaku Menanti secara bertahap tidak secara langsung turun semuanya sejumlah 14 juta rupiah.

Pelatihan pembuatan topeng ini terbuka untuk semua umur. Maksudnya terbuka ini semua warga di desa diberi pelatihan bagaimana cara membuat topeng. Setelah membuat topeng warga di desa saling membantu untuk mewarnai atau menghias topeng tersebut yang pada akhirnya karya mereka diperjualbelikan kepada masyarakat yang datang ke desa mereka. Sampai saat ini jumlah kepala keluarga yang tinggal di desa tersebut sebanyak 35 kepala keluarga. Masing-masing keluarga mendapatkan 1 unit rumah beserta isinya seperti kursi, meja, lemari pakaian, dan 1 buah kasur. Tidak hanya mendapatkan itu saja, tetapi tiap kepala keluarga mendapatkan bantuan berupa uang tunjangan hidup (jadup) sejumlah 9 juta rupiah dan uang untuk modal usaha 5 juta rupiah. Uang dengan jumlah 14 juta rupiah ini tidak langsung diberikan semuanya, akan tetapi bertahap dan uang tersebut harus dibelanjakan untuk modal membuka usaha.

Program kerja “Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial” ini mulai berjalan sejak bulan November tahun 2017. Sampai saat ini desa tersebut mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terbukti saat ini di desa tersebut menjadi desa wisata 1.000 topeng. Di desa tersebut memberikan banyak spot-spot yang bisa di jadikan tempat untuk berfoto. Bukan hanya itu saja saat ini di desa sudah disediakan arena bermain bagi anak-anak maupun orang dewasa. Arena bermain untuk anak-anak antara lain yaitu ayunan, perosotan, tempat mewarnai topeng, tempat membuat topeng. Sedangkan untuk arena bermain bagi orang dewasa seperti Outbond.

## **1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Malang**

Kantor Dinas Sosial Kota Malang ini berdekatan dengan masjid jadi sangat memudahkan bagi pegawai Kantor Dinas Sosial Kota Malang untuk melakukan ibadah secara berjamaah. Selain itu Kantor Dinas Sosial Kota Malang ini sendiri sangat dekat dengan toko yang menjual bahan-bahan sembako atau peralatan sekolah. Tidak hanya itu Kantor Dinas Sosial Kota Malang ini juga berdekatan dengan orang jualan tepat di depan kantor tersebut yang lebih tepatnya di Taman Sulfat banyak sekali orang-orang yang jualan makanan dan minuman. Bukan hanya dekat dengan tempat-tempat seperti di atas tadi tapi Kantor Dinas Sosial Kota Malang ini juga dekat dengan Puskesmas yang berada kurang lebih 100 meter dari Kantor Dinas Sosial Kota Malang.

Kantor Dinas Sosial Kota Malang ini tepatnya berada di alamat Jalan Raya Sulfat No. 12, Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur kode pos 65122.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dinsos.”Alamat Dinas Sosial.” <https://sosial.malangkota.go.id/> (diakses pada tanggal 18 April 2018 pukul 07.34 WIB)

Visi dan misi Dinas Sosial Kota Malang ini berkaitan dengan Visi dan Misi Kota Malang itu sendiri. Visi dan Misi Kota Malang adalah **“Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Bermartabat”** dilandaskan oleh semangat *Peduli Wong Cilik*. Sebagai semangat dari pembangunan Kota Malang Tahun 2013-2018, kepedulian wong cilik menjadi jiwa dari pencapaian visi.

Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi wong cilik dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik yang notabene adalah rakyat kecil yang mayoritas jumlahnya di Kota Malang.<sup>2</sup> Selain itu visi bermartabat menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan, sehingga diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakat.

Selain itu visi bermartabat juga merupakan akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode tahun 2014-2018, yakni **BER**sih, **MA**kmur, **AD**il, **REL**igius-toleran, **TER**kemuka, **AM**an, **BER**budaya, **AS**ri, dan **TER**didik.<sup>3</sup> Bermula dari uraian tentang visi dan misi Kota Malang sendiri maka ditetapkanlah visi dan misi Dinas Sosial Kota Malang yang merupakan nafas dari pada visi dan misi Kota Malang adalah **“Terwujudnya Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sejahtera dan bermartabat.”**<sup>4</sup>

Untuk mewujudkan visi di atas maka selanjutnya Dinas Sosial Kota Malang menjabarkan visi tersebut dalam misi yang menjadi pedoman dalam

---

<sup>2</sup> Buku Profil Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2014 hal 8

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal 11

melakukan aktivitas melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. Jadi misi memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan/ upaya-upaya yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Adapun Misi Dinas Sosial Kota Malang adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- b. Mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintahan dan Masyarakat.
- c. Meningkatkan sistem informasi dan pelaporan bidang sosial.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, maka negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.<sup>6</sup> Kantor Dinas Sosial Kota Malang memiliki empat bidang yang menangani Penyandang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> Buku Profil Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2014 hlm 1

Masalah Kesejahteraan Sosial. Bidang tersebut antara lain yaitu; Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial.<sup>7</sup>

Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Secara wajar, secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, pelatihan, vokasional. Pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, fisik, sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asisten sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjutan dan rujukan.<sup>8</sup>

Bidang Rehabilitasi Sosial ini menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial antara lain; Rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial Eks Psikotik dan Korban Pasung, Rehabilitasi sosial Orang Dengan Kecacatan (ODK) dan orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB), Rehabilitasi sosial Tuna Sosial.

Jaminan Sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, mental, fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis, yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.<sup>9</sup> Selain itu juga adanya penghargaan atas jasa-jasa kepada pejuang perintis kemerdekaan, dan keluarga paglawan. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asusransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. Bidang Jaminan Sosial ini menangani Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), Asistensi Orang Dengan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> *Ibid.*,

Kecacatan Berat (ASODKB), Penerimaan Bantuan Iuran, Bantuan Tunai Bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH).

Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri. Selain itu juga untuk meningkatkan peran serta lembaga dan atau perseorangan sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.<sup>10</sup> Pemberdayaan sosial dilakukan melalui: peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan nilai-nilai dasar, potensi dan sumber daya, pemberian akses, dan pemberian bantuan usaha.

Perlindungan Sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau, masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat teoat hidup secara wajar, baik bersifat sementara atau berkelanjutan dalam bentuk bantuan langsung atau penyediaan aksesibilitas dan penguatan lembaga.<sup>11</sup> Bidang Perlindungan Sosial ini menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seperti; Anak/balita Korban tindak kekerasan, wanita korban tindak kekerasan, lanjut usia korban tindak kekerasan.

Selain visi dan misi Dinas Sosial Kota Malang ada juga tujuan dari Dinas Sosial Kota Malang, berikut tujuan Dinas Sosial Kota:<sup>12</sup>

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang sosial;
3. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang sosial;
4. Pelaksanaan pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
5. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Tupoksi Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2014



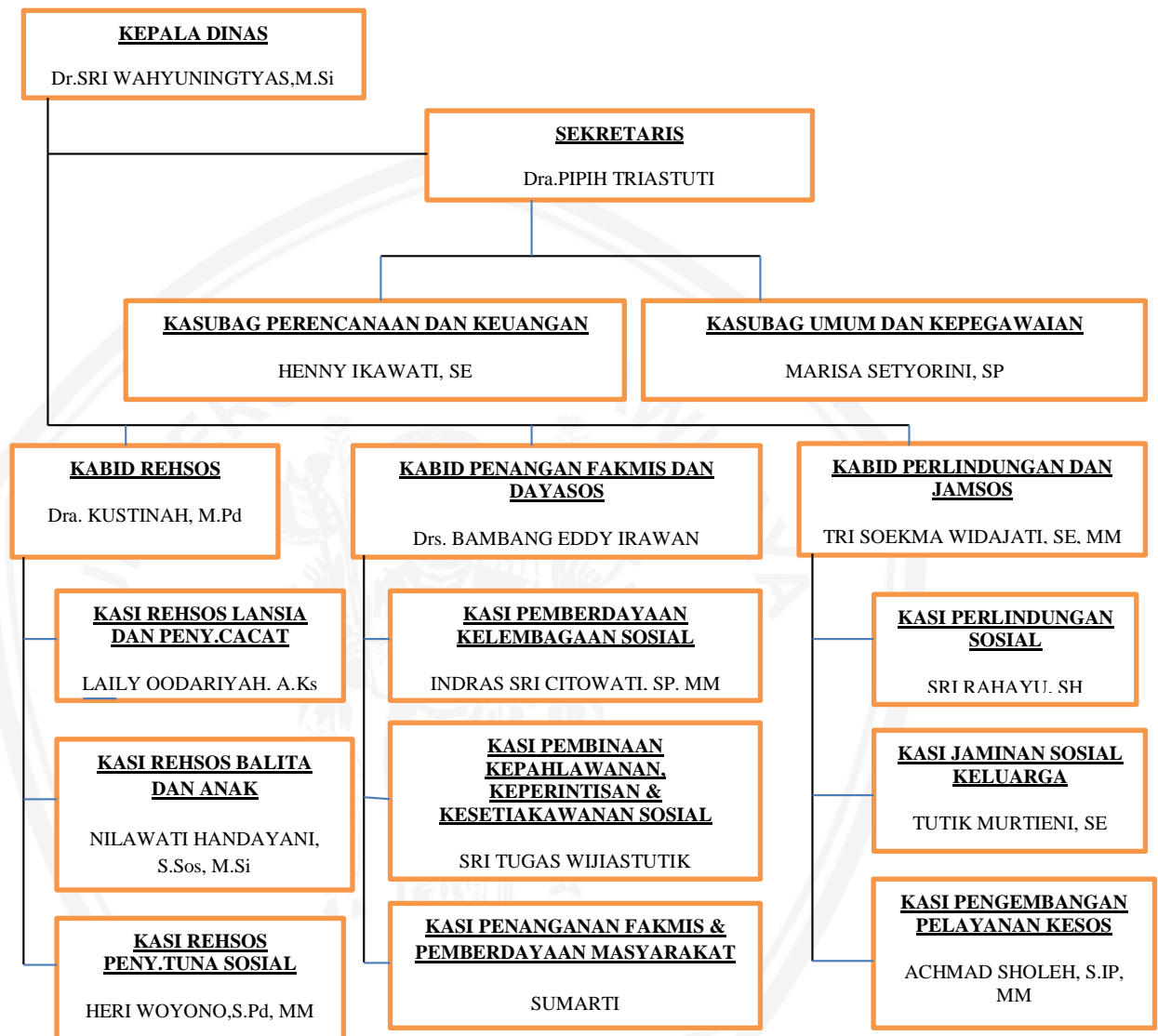
6. Pelaksanaan pembinaan anak terlantar, para penyandang cacat, panti asuhan/panti jompo, eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, Pekerja Seks Komersial (PSK), narkoba dan penyakit sosial lainnya;
7. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, Anak Jalanan, psikotik;
8. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
9. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna, Karang Werda, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Organisasi Sosial (Orsos), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial, Keluarga Pioner dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
10. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan Loka Bina Karya (LBK) Pandanwangi, Barak Sukun, Taman Makam Pahlawan, Makam Pahlawan Trip dan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS);
11. Pemberian rekomendasi klien ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Panti Rehabilitasi Sosial (PRS), Panti Sosial (PS), Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Panti jompo dan Panti Balita;
12. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);
13. Pelaksanaan kegiatan penanganan pengungsi akibat korban bencana;
14. Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang sosial;
15. Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang sosial yang menjadi kewenangannya;
16. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
18. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
19. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
20. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
21. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
22. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
23. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
24. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
25. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;

26. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
27. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
28. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
29. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan keterangan di atas tersebut adalah tujuan Dinas Sosial Kota Malang yang dilaksanakan dengan memperhatikan visi dan misi Pemerintah Kota Malang dan Dinas Sosial Kota Malang. selain itu peneliti juga akan menjelaskan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Malang pada Tahun 2018.

Berikut adalah gambar bagan struktur Dinas Sosial Kota Malang:<sup>13</sup>

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2018



Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2018

### 1.3 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang peneliti gunakan disini berupa desa yang ada di Kota Malang. Desa yang penduduknya semuanya bekas gelandangan dan

<sup>13</sup> Humas Dinsos. "Struktur Dinas Sosial." [www.dinsos.malang.go.id](http://www.dinsos.malang.go.id). (diakses pada tanggal 18 April 2018 pukul 08.50 WIB)

pengemis di Kota Malang. Obyek penelitian ini tepatnya ada di Dusun Baran, RT 04 RW 07, Kelurahan Tlogowau, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Desa ini adalah bagian dari program kerja yang dinamakan “Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial.” Program kerja yang dijalankan oleh Pemerintahan Kota Malang khususnya oleh Dinas Sosial Kota Malang. Program kerja ini sudah berjalan mulai November 2016 akan tetapi baru diresmikan bersamaan dengan hari ulang tahun istri Wali Kota Malang yaitu Ibu Farida.

Peresmian desa ini dan acara hari ulang tahun Ibu Farida pada tanggal 14 Februari 2017. Peresmian desa tersebut di hadiri oleh Bapak Wali Kota Malang yaitu Bapak Anton yang mendampingi sang istri berkunjung ke desa. Dusun Baran sendiri memiliki luas kurang lebih 5.000 hektar. Kondisi desa tersebut berada di perbukitan dengan sekeliling desa masih berupa pohon-pohon yang tinggi. Akses jalan menuju desa tersebut bisa di bilang sangat jauh dari pusat perkotaan. Jarak terdekat dari desa ke jalan raya utama sejauh kurang lebih 5 kilometer yaitu ke Jalan Mayjend Sungkono.

Awal mulanya desa ini hanya berupa desa biasa yang tidak ada menariknya sama sekali, akan tetapi sesuai perkembangan dan rencana yang di buat. Sekarang desa tersebut dikenal sebagai Desa Wisata 1.000 Topeng. Penduduk desa yang semuanya dulu mencari uang dengan cara mengemis dan mengamen di jalanan. Sekarang berubah mereka sudah mempunyai pekerjaan masing-masing sebagi penjual atau membuka usaha sendiri tidak lagi turun ke jalan untuk mengamen dan mengemis.

Akses jalan menuju desa ini sekarang sangat baik dan mudah dijangkau oleh semua kendaraan bermotor. Sudah tidak ada lagi jalan berlubang dan berlumpur saat hujan tiba. Hanya saja lebar jalan menuju desa cukup sempit hanya selebar 2 mobil saja itupun sangat mepet sekali harus pelan-pelan jika berhadapan mobil dengan mobil. Dengan perkembangan pogram kerja yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang sekarang akses jalan raya menuju lokasi Desa Baran sangat mudah sekali dan dapat dilalui berbagai jenis kendaraan bermotor. Selain itu penerangan di jalanan juga sudah sangat memadai. Sebelum adanya sprogram kerja “Desaku Menanti” ini di Desa Baran. Penerangan jalan raya di sekitar desa tersebut sangat minim sekali, hanya ada penerangan di rumah-rumah warga asli saja tidak ada penerangan untuk akses jalan raya. Tidak usah kuatir bagi pengunjung yang tidak tahu jalan menuju Desa Wisata Topeng tersebut, karena pihak Dinas Sosial Kota Malang sudah memasang penunjuk jalan untuk menuju ke desa wisata tersebut.

## **BAB V**

### **IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA “DESAKU MENANTI KAMPUNG KESEJAHTERAAN SOSIAL”**

Bab ini membahas tentang bagaimana proses jalannya program kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang khususnya untuk pihak Dinas Sosial Kota Malang. Untuk mensukseskan program kerja Desaku Menanti ini pihak Pemkot Malang bekerja sama dengan pihak IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) Mutiara Insani, Bank Indonesia, PLN, PDAM dan instansi-instansi yang ada di Kota Malang (sesuai kebutuhan di Desa). Peneliti akan membahas implementasi program kerja ini memakai 4 variable dari George C. Edward yaitu; Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Peneliti memakai 4 variable dari Edward untuk mengetahui apa saja yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang dalam menjalankan program kerja ini dan hambatan-hambatan apa saja yang di temui oleh Dinas Sosial Kota Malang.

#### **5.1 Komunikasi**

Komunikasi sangat penting untuk mensukseskan jalannya suatu program kerja terutama komunikasi aktor-aktor. Kelancaran komunikasi pihak Pemkot Malang khususnya Dinsos Kota Malang dengan semua mitra kerjanya harus berjalan dengan baik dan jelas sesuai dengan keadaan di lapangan. Komunikasi yang dilakukan Dinsos Kota Malang harus sesuai dengan kebutuhan di desa. Contohnya pihak Dinsos Kota Malang ingin mengecek kesehatan penduduk di desa, maka Dinsos Kota Malang akan bekerja sama dengan pihak Dinas



Kesehatan. Contoh lainnya yaitu; ketika Dinsos Kota Malang ingin membantu menguruskan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk warga di Desa tersebut. Pihak Dinsos Kota Malang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan. Dinas Sosial Kota Malang berkomunikasi dengan pihak Satpol PP dalam melaksanakan razia di jalanan Kota Malang. Komunikasi antar aktor-aktor terkait ini harus tepat dan akurat agar informasi atau perintah yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan dilaksanakan dengan benar.

Awal mula komunikasi Dinas Sosial Kota Malang dengan Kementerian Sosial RI ini adalah sesuai dengan program kerja dari Gubernur Jawa Timur yang ingin memprioritaskan 5 PMKS di Jawa Timur. Lima PMKS ini adalah Gelandangan, Pengemis, gelandangan Psikotik, Anak Jalanan dan WTS (Warga Tuna Sosial). Gubernur Jawa Timur ingin mengurangi jumlah Gelandangan dan Pengemis yang ada di Jawa Timur. Akhirnya Kementerian Sosial membuat program kerja yang dinamakan “Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial.” Program kerja ini membantu para gelandangan dan pengemis agar mendapatkan tempat tinggal yang layak dan pekerjaan yang lebih manusiawi.

Komunikasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang kepada Kementerian Sosial RI yaitu dengan cara membuat proposal untuk melaksanakan program kerja “Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial” di daerah Kota Malang. Sebelum dikirimny proposal kepada Kementerian Sosial. Dinas Sosial bersama Kementerian Sosial melakukan survey lapangan untuk mencari tempat yang cocok dan siap dibangun perumahan bagi eks gelandangan dan pengemis. Komunikasi yang bertahap inilah yang bisa mensukseskan jalannya suatu program

kerja. Bantuan yang diberikan Dinas Sosial Kota Malang untuk warga Desaku Menanti ada juga berupa bebas membayar air dan diberikan bantuan uang sebesar 100rb untuk dibelikan listrik. Bantuan bebas biaya listrik dan air ini pihak Dinas Sosial Kota Malang berkomunikasi dengan pihak PLN dan PDAM.

Menurut George C. Edward seperti yang di kutip dari Winarno, ada tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

### **5.1.1 Transmisi**

Penyaluran informasi atau perintah dari Pemkot Malang kepada Dinsos Kota Malang dan semua mitra kerjanya harus disampaikan dengan jelas dan baik. Jika penyampaiannya kurang baik dan kurang jelas, maka penerima informasi atau perintah tersebut juga akan buruk dan tidak sesuai apa yang diinginkan. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan oleh banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan oleh pemberi informasi sering meleset di tengah jalan.

Miskomunikasi antar instansi inilah yang harus dihindari oleh semua aktor yang menjalankan program kerja Desaku Menanti ini. Sejauh ini menurut peneliti sesuai pengalaman langsung peneliti ke lapangan. Komunikasi yang dijalankan antar aktor-aktor penyelenggara ini sangat baik dan jelas. Terbukti dengan adanya apresiasi dari Ibu Khofifa selaku Menteri Sosial RI. Ibu Khofifah sangat apresiasi dengan perkembangan Kampung Desaku Menanti ini.

Adanya apresiasi langsung dari Ibu Menteri Sosial RI ini membuktikan bahwa komunikasi yang dijalin semua aktor yang terleibat dalam program kerja

Desaku Menanti ini sudah berjalan sangat baik sesuai harapan dari dari semua pihak yang terlibat. Perkembangan di desa ini sekarang semakin pesat terbukti dengan dari awal mula desa tersebut hanya sebatas desa para eks gelandangan dan pengemis saja. Sekarang desa tersebut sudah di kenal dengan sebutan Desa Wisata 1000 Topeng banyak masyarakat Kota Malang bahkan sampai luar Kota Malang juga yang berkunjung ke desa tersebut untuk sekedar foto-foto atau rekreasi bersama teman-temannya.

### **5.1.2 Kejelasan**

Kejelasan yang dimaksud di sini adalah kejelasan pelaksanaan suatu program kerja, kejelasan penyampaian informasi atau perintah, kejelasan komunikasi antar instansi-instansi pemerintahan yang terkait dan kejelasan tugas. Untuk menyampaikan suatu informasi atau suatu perintah harus dengan jelas siapa yang dituju dan siapa yang melaksanakan perintah tersebut. Jika suatu komunikasi tidak jelas maksudnya atau ambigu maka dari penerima informasi atau perintah juga akan bingung menjalankan perintahnya yang pada akhirnya tidak sesuai dengan tujuan perintah tersebut atau tidak sesuai informasi yang di berikan.

Pelaksanaan program kerja Desaku Menanti ini sudah sangat jelas sekali tugas masing-masing instansi. Seperti Dinas Sosial Kota Malang tugasnya jelas untuk melaksanakan program kerja tersebut yang dibantu oleh instansi pemerintah lainnya contohnya Dinas Kependudukan tugasnya untuk membantu mengurus surat-surat yang dibutuhkan mengenai status penduduk di Desaku Menanti ini. Dinas Kesehatan tugasnya untuk membantu masalah kesehatan penduduk di Desaku Menanti. Lalu Kementerian Sosisl RI selaku penggagas program kerja ini

tugasnya sudah jelas untuk memantau perkembangan program kerja dan menyediakan bantuan-bantuan untuk penduduk di Desaku Menanti. Adapun tugas LKS Mutiara Insani tugasnya untuk membantu Dinas Sosial Kota Malang untuk mensukseskan jalannya program kerja ini. Tidak hanya itu saja LKS Mutiara Insani ini juga sebagai pendamping tiap-tiap Kepala Keluarga.

Pendamping ini tugasnya untuk memberikan masukan-masukan yang baik atau mendengarkan keluhan warga Desa untuk disampaikan ke pihak Dinas Sosial Kota Malang. Sebenarnya ada beberapa LKS yang di tunjuk oleh Dinas Sosial Kota Malang untuk mendampingi warga di Desaku Menanti. Akan tetapi yang dipercaya oleh Dinas Sosial Kota Malang yaitu LKS Mutiara Insani, karena LKS tersebutlah yang mempunyai data-data gelandangan dan pengemis di Kota Malang yang secara lengkap. Lengkap disini diartikan lengkap secara data personal gelandangan dan pengemis mulai dari alamat lengkap beserta anggota keluarga yang tinggal di rumahnya.

### **5.1.3 Konsistensi**

Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung secara efektif maka perintah-perintah pelaksanaan harus berjalan dengan konsisten dan jelas, sehingga dapat memudahkan para pelaksana mengimplementasikan kebijakan dengan baik.<sup>1</sup> Sejauh ini sesuai pengamatan peneliti di lapangan pihak Dinas Sosial Kota Malang sangat konsisten menjalankan tugasnya di program kerja ini. Terbukti setiap hari ada pegawai Dinas Sosial Kota Malang yang ditugaskan langsung ke desa. Tugas pegawai di desa ini untuk melihat secara langsung kehidupan para

---

<sup>1</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: MedPress, 2008), hlm: 177

warga desa tersebut. Selain itu juga untuk melihat masalah apa saja yang ada di desa sehingga menghambat proses pelaksanaan program kerja ini.

Jika menemukan hambatan-hambatan pegawai Dinas Sosial Kota Malang langsung berkomunikasi dengan instansi yang terkait. Contohnya pernah ada seorang bayi yang sedang sakit maka pegawai Dinas Sosial Kota Malang yang ditugaskan langsung turun ke Desa tersebut langsung berkomunikasi dengan pihak Dinas Kesehatan atau langsung bayi tersebut diantarkan ke puskesmas terdekat.

Keberhasilan konsistensi ini harus didukung dengan instansi-instansi pemerintah lainnya. Suatu program tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak ada gotong royong antar aktor-aktor terkait. Bukti konsistensi Dinas Sosial Kota Malang dalam menjalankan program kerja ini adalah dengan adanya jadwal piket di bidang Rehabilitasi Sosial. Jadwal piket ini dimaksudnya piket langsung turun ke desa untuk melihat perkembangan warga di desa dan melihat masalah apa saja yang timbul. Tidak perlu diragukan lagi untuk konsistensi Dinas Sosial Kota Malang dalam menjalankan program kerja “Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial. Konsistensi yang ditunjukkan oleh pihak Dinas Sosial Kota Malang salah satunya adalah membuat jadwal piket harian bagi pegawai Dinas Soaial Kota Malang.

Jadwal Piket harian ini di tujukan untuk memantau perkembangan warga binaan sosial tersebut. Selain untuk melihat perkembangan warga desa juga berfungsi untuk melihat masalah-masalah apa saja yang timbul di lingkungan desa

dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara berkomunikasi dengan pihak-pihak yang dibutuhkan.

## 5.2 Sumber Daya

Sumber daya disini peneliti lebih fokus pada sumber daya manusianya. Menurut Edward sumber daya ini merupakan salah satu variable yang sangat penting sekali dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Jika dalam implementasi suatu kebijakan kekurangan sumber daya maka kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif. Dalam program kerja Desaku Menanti ini menurut peneliti sudah cukup memadai, karena sudah ada bagiannya masing-masing yang memegang kendali. Seperti yang sudah dipaparkan peneliti di atas. Dinas Kesehatan untuk membantu Dinas Sosial Kota Malang dalam urusan kesehatan warga Desaku Menanti, Dinas Kependudukan untuk membantu Dinas Sosial Kota Malang dalam urusan surat-surat kependudukan yang dibutuhkan oleh warga Desaku Menanti. Selain dari instansi Kota Malang ada juga dari pihak luar instansi Pemerintah Kota Malang salah satunya yaitu Ikatan Akuntan Indonesia Komisariat Malang Raya (IAI).

IAI ini melaksanakan kegiatan di Desaku Menanti. Pemberian bantuan ini sebanyak 290 paket sembako yang dibagi di tiga titik, yaitu 50 paket di Masjid Darussalam Muharto, 50 paket di daerah berdekatan dengan Desaku Menanti, dan selebihnya di Kampung Desaku Menanti<sup>2</sup>. Wawali Kota Malang Bapak Sutiaji dalam sambutannya menyampaikan bahwa membantu sesama dengan menyisihkan sebagian penghasilan kita adalah suatu hal yang sangat mulia dan

---

<sup>2</sup> Hasil Power Point Dinas Sosial Kota Malang tentang Program Kerja Desaku Menanti Tahun 2017



patut untuk terus dilestarikan. Bersedekah di bulan Ramadan, seperti dituturkannya, juga sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Pemberian bantuan ini diharapkan bisa semakin menambah berkah, sebab sedekah adalah doa untuk menolak balak sehingga sangat dianjurkan untuk dilakukan. Ditambahkannya, saat ini masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan uluran tangan kita.

Kegiatan sosial seperti ini, dituturkan oleh Ketua IAI Malang yaitu Puji Handayati. Kegiatan ini digelar pada bulan Ramadan, maka diisi dengan kegiatan Ramadan bersedekah. Sebelumnya, IAI Malang juga beberapa kali menggelar kegiatan serupa yaitu pemberian bantuan serta kegiatan pendampingan dan pelatihan-pelatihan agar warga Desaku Menanti dapat hidup mandiri serta hasil karyanya berdaya saing. Sesuai dengan komitmen awal IAI dengan Pemerintah Kota Malang dalam hal ini melalui Dinas Sosial Kota Malang, IAI akan terus membantu warga Desaku Menanti sampai benar-benar bisa mandiri. Bantuan itu berupa bantuan langsung maupun berupa pendampingan berbagai pelatihan yang dibutuhkan warga setempat.

Selain dari instansi pemerintahan Dinas Sosial Kota Malang juga mendapatkan bantuan sumber daya dari Pekerja Sosial (relawan dari LKS Mutiara Insani). Sumber daya dalam program kerja ini sudah mencukupi tidak heran perkembangan di Desa sekarang menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Tidak hanya desanya saja yang mengalami perkembangan secara baik, akan tetapi dari penduduk desanya juga mengalami perubahan mulai dari segi penampilan,

perilaku dan pekerjaan mereka. Sumber daya menurut Edward ini ada 3 yaitu staf, wewenang dan fasilitas.

### **5.2.1 Staf**

Jumlah staf sangat berpengaruh pada efektifitas suatu kebijakan dan kecakapan harus dimiliki pegawai pemerintahan.<sup>3</sup> Staff yang ada juga harus profesional sesuai keahlian di bidangnya masing-masing, sehingga keahlian yang dimiliki dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan kedudukannya. Staff di Dinas Sosial Kota Malang menurut peneliti sudah menempati posisi sesuai dengan keahlian dibidangnya. Terbukti dengan gelar pendidikan masing-masing pegawai Dinas Sosial Kota Malang yang sudah menempati sesuai dengan keahlian dibidangnya (lihat pada struktur organisasi Dinas Sosial Kota Malang pada halaman 46).

### **5.2.2 Wewenang**

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan kewenangannya yang didapat. Dinas Sosial Kota Malang mempunyai kewenangan lebih untuk menjalankan program kerja Desaku Menanti dimana program kerja ini dari Kementerian Sosial RI yang dijalankan di Kota Malang. Mengapa Dinas Sosial Kota Malang mempunyai kewenangan lebih dikarenakan program kerja ini untuk gelandangan dan pengemis yang notabnya tugas untuk mengurus seputar gelandangan dan pengemis adalah tugas Dinas Sosial Kota Malang.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

Kewenangan lebih disini dimaksud pegawai Dinas Sosial Kota Malang lebih banyak menjalankan tugasnya untuk program kerja Desaku Menanti ini khususnya di bidang Rehabilitasi Sosial (RehSos). Bidang RehSos ini tugas pokok dan fungsinya salah satunya adalah mengurus tentang gelandangan dan pengemis.

### **5.2.3 Fasilitas**

Fasilitas disini merupakan salah satu unsur yang sangat penting sekali dalam menunjang kesuksesan suatu program kerja. Jika sudah ada staff yang memadai dan wewenang yang dimiliki cukup baik dan jelas akan tetapi tidak ada fasilitas yang menunjang maka akan sangat sulit sekali mencapai suatu keberhasilan program kerja. Jadi fasilitas sangat diperlukan untuk menunjang kinerja para staff atau instansi yang terkait dalam program kerja Desaku Menanti ini. Untuk program kerja Desaku Menanti ini sendiri fasilitas untuk para pegawai Dinas Sosial Kota Malang menurut peneliti sudah cukup memadai, mulai dari kendaraan, akses jalan dari kantor menuju desa. Sedangkan fasilitas yang diberikan oleh penduduk di desa sendiri yaitu berupa 1 unit rumah, 11 unit kamar mandi umum, 1 unit bengkel kerja dan 1 unit mushola untuk beribadah umat muslim dikarenakan mayoritas penduduk desa beragama muslim.

Tidak hanya berupa fasilitas itu saja yang diberikan kepada penduduk desa. Tetapi juga berupa bantuan modal usaha sebesar 5 juta rupiah dan uang jaminan hidup sebesar 9 juta rupiah yang diberikan secara bertahap kepada setiap Kepala Keluarga. Bantuan uang 14 juta rupiah ini bertujuan untuk modal usaha setiap keluarga dan untuk kelangsungan hidup warga di desa dengan catatan harus membeli barang-barang atau peralatan untuk membuka usaha. Seiring dengan

perkembangan program kerja Desaku Menanti ini. Fasilitas yang diberikan kepada warga di desa khususnya kepada anak-anak kecil yaitu berupa taman bermain dan pendidikan yang gratis tidak dipungut biaya sama sekali mulai dari TK, SD dan SMP. Sedangkan untuk SMA tidak semuanya diberikan pendidikan gratis hanya saja beberapa anak yang dirasa perlu diberi bantuan seperti bantuan untuk membayar SPP mereka.

Seperti Keluarga dari Ibu Sumiarti yang mendapatkan bantuan langsung dari Ibu Kepala Dinas Sosial Kota Malang yaitu Ibu Sri Wahyuningtyas. Ibu Sumiarti mendapatkan bantuan uang untuk membiayai SPP anaknya yang sedang duduk di bangku sekolah kelas 3 SMA. Bantuan dari Ibu Sri ini diberikan sampai anak dari Ibu Sumiarti lulus sekolah tingkat SMA. Alasan Ibu Yuyun panggilan dari Kepala Dinas Sosial Kota Malang ini memberikan bantuan uang untuk SPP anaknya adalah karena Ibu Yuyun merasa kasihan karena anaknya akan lulus SMA dan faktor lainnya seperti minimnya pendapatan Ibu Sumiarti. Berikut petikan wawancara peneliti dengan Ibu Sumiarti tentang bantuan uang untuk bayar SPP anaknya:

“...Aku mas minta bantuan ke Bu Yuyun buat membiayai sekolah anakku yang di SMA. Anakku ga bisa lulus SMA kalau uang SPP nya tidak dilunasi. Karena SPP anakku nunggak selama 3 bulan. Terus aku minta bantuan sama Ibu Sri buat bayar SPP anakku akhirnya diberi uang dengan syarat hanya untuk membaya uang SPP anaknya bukan untuk lainnya...”<sup>4</sup>

Pihak Dinas Sosial Kota Malang juga membantu mereka yang sedang kesusahan untuk pergi ke puskesmas bantuan ini berupa diberikan obat-obatan sesuai yang dibutuhkan oleh warga yang sedang sakit. Tidak hanya itu saja Dinas

---

<sup>4</sup> Petikan wawancara dengan Ibu Sumiarti salah satu warga di Desa pada tanggal 29 Januari 2017

Sosial Kota Malang juga membantu mengurus penduduk Desa untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru yang beralamatkan di desa mereka tinggal sekarang.

Ada juga fasilitas yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial Kota Malang yang bekerja sama dengan pihak PLN dan PDAM. Kerja sama ini untuk warga Desaku Menanti dibebaskan biaya membayar listrik selama mereka menempati rumah tersebut. Tidak hanya itu juga tiap rumah juga di berikan 100rb rupiah untuk membayar air. Seperti kutipan wawancara peneliti dengan Ibu Kustiari;

“...Saya juga mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kota Malang, kami tidak perlu membayar listrik lagi karena sudah dibayarkan oleh Dinas Sosial Kota Malang bukan itu saja kami juga diberi uang 100rb untuk membayar Air perbulannya”<sup>5</sup>

Suatu program kerja yang sudah disusun secara teratur tidak akan berjalan sesuai rencana dan tidak akan terealisasi jika tidak ada ketiga unsur yang sudah peneliti jelaskan tadi diatas. Oleh karena itu, sumber daya merupakan salah satu faktor yang sangat penting sekali dalam sebuah keberhasilan program kerja.

### **5.3 Disposisi atau Sikap**

Suatu keberhasilan program kerja dalam pelaksanaannya ditentukan oleh sikap masing-masing individu atau aktor yang ada di dalam program kerja tersebut. Jika sikap aktor baik dan mau mengikuti alur sesuai rencana maka program tersebut akan berjalan lancar dan mencapai tujuan sebuah program kerja. Tetapi jika sikap aktor tersebut tidak baik atau tidak mau mematuhi perintah dan peraturan yang ada tidak menutup kemungkinan sebuah program kerja akan gagal

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Kustiari salah satu penduduk Desaku Menanti pada tanggal 25 Januari 2017 pukul 14.00 WIB

total tidak sesuai dengan rencana dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu sikap dari masing-masing individu sangat menentukan kesuksesan sebuah program kerja.

Sejauh ini program kerja Desaku Menanti sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk membantu para gelandangan dan pengemis mendapatkan hidup yang layak. Keberhasilan program kerja Desaku Menanti ini tidak terlepas dari sikap positif yang ditunjukkan oleh setiap individunya. Selama ini para pegawai Dinas Sosial Kota Malang sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan dari atasan mereka. Peneliti beri contoh seperti halnya Bapak Arip dan Bapak Doni yang awalnya hanya mengantarkan dan menjemput pegawai yang bertugas ke desa langsung. Mulai dari bulan Januari tahun 2018 Bapak Arip dan Bapak Doni berpindah tugas menjadi sales jajanan penduduk desa. Bapak Arip dan Bapak Doni sekarang ditugaskan untuk mengantarkan produk makanan dari penduduk desa ke sekolah-sekolah di Kota Malang atau ke instansi-instansi pemerintah Kota Malang.

Mulai perubahan yang kecil itu bisa membantu penduduk desa untuk memasarkan hasil produk makanan penduduk desa. Tidak hanya itu saja setiap Hari Besar Nasional seluruh pegawai khususnya bagian Rehabilitasi Sosial mengadakan acara di desa. Seperti kegiatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Pihak Dinas Sosial Kota Malang mengadakan acara untuk memperingati Hari Kemerdekaan dengan acara lomba anak-anak maupun lomba untuk dewasa. Tujuannya ini untuk memberikan hiburan serta menumbuhkan rasa nasionalis untuk kepada penduduk desa dan agar tali silaturahmi antara pegawai



Dinas Sosial Kota Malang dengan penduduk desa semakin erat dan baik. Saat acara ulang tahun istri dari Wali Kota Malang Bapak Anton. Beliau meminta agar acara ulang tahun sang istri dirayakan di desa.

Semua pegawai Dinas Sosial Kota Malang pun ikut mempersiapkan acara tersebut tidak lupa juga peneliti juga ikut membantu persiapan acara ulang tahun istri Bapak Anton tersebut. Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2017. Peneliti ikut menginap di desa tersebut bersama beberapa pegawai Dinas Sosial Kota Malang. Semua pegawai Dinas Sosial Kota Malang ikut memeriahkan acara tersebut. Persiapan yang dilakukan pihak Dinas Sosial Kota Malang terlepas dari apa jabatan mereka di dalam Dinas Sosial Kota Malang.

Dari acara itu peneliti bisa menilai bahwa keberhasilan sebuah acara dapat diwujudkan jika masing-masing individu mau melakukan tugasnya sesuai dengan perintah dari atasan mereka tanpa ada kepentingan pribadi.

#### **5.4 Struktur Birokrasi**

Birokrasi merupakan salah satu aspek yang paling penting karena secara keseluruhan menjadi pelaksana suatu program kerja. Pada dasarnya, para pelaksana tentu mengetahui tugas masing-masing yang harus dilakukan untuk keberhasilan suatu program kerja. Keberhasilan suatu program kerja didukung oleh baiknya suatu birokrasi yang terstruktur jelas. Struktur birokrasi yang jelas bisa memudahkan para birokratnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan apa yang ditugaskan. Struktur Birokrasi di dalam Dinas Sosial Kota Malang sudah sangat jelas pembagian tugasnya masing-masing sesuai dengan keahlian birokratnya.

Kejelasan struktur birokrasi di dalam Dinas Sosial Kota Malang ini terdapat 3 bidang yang berbeda tugas untuk menangani masalah sosial yang ada di Kota Malang. Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Perlindungan Jaminan Sosial. Peneliti akan menjelaskan Bidang Rehabilitasi Sosial saja, karena di bidang inilah yang menjalankan program kerja “Desaku Menanti Kampugn Kesejahteraan Sosial” sesuai dengan fokus peneliti.

Bidang Rehabilitasi Sosial ini untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial; pelatihan vokasional, pelayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjutan dan rujukan.<sup>6</sup> Bidang Rehabilitasi Sosial ini bidang yang fokus untuk melaksanakan program kerja Desaku Menanti. Bidang Rehabilitasi Sosial inilah bidang yang menangani masalah kesejahteraan sosial terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Maka dari itulah Bidang Rehabilitasi Sosial yang banyak tugasnya untuk menjalankan program kerja Desaku Menanti ini.

Menurut Edwar dikutip dari Winarno ada dua karakteristik utama birokrasi yaitu *Standart Operating Procedurs* (SOP) dan Fragmentasi.

---

<sup>6</sup> Buku Profil Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2014 hlm 1.

#### 5.4.1 *Standart Operating Procedures (SOP)*

Standart operasional prosedur merupakan tolak ukur dasar yang berupa prosedur-prosedur dalam menanggulangi keadaan umum yang digunakan dalam organisasi-organisasi publik atau swasta.<sup>7</sup> SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana program kerja dalam bertindak atau melaksanakan tugasnya. Tetapi SOP juga sangat mungkin menghambat pelaksana program kerja dalam menjalankan tugasnya. Hambatan ini muncul ketika ada personil baru yang masuk dalam struktur organisasi. Personil tersebut membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap SOP yang berlaku di tempatnya.

SOP Dinas Sosial Kota Malang melalui surat keputusan dari Kepala Dinas Sosial Kota Malang yang telah disetujui atau ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2017. Sebenarnya tiap tahun Dinas Sosial Kota Malang memiliki SOP, akan tetapi yang peneliti ambil disini SOP yang terbaru yaitu tahun 2017 karena tahun 2018 masih belum ada. Berikut petikan wawancara peneliti dengan Ibu Putri salah satu staff dari Dinas Sosial Kota Malang:

“...Untuk SOP di Dinas Sosial Kota Malang ini sebenarnya tiap tahun ada tapi yang terbaru tahun 2017. Karena tahun 2018 masih belum ada dan dari ibu kepala dinas sendiri juga tidak memberi tugas untuk membuat SOP yang baru. Jadi Dinas Sosial masih memakai SOP tahun 2017. Sebenarnya kita masih menyimpah SOP tahun 2016 juga”<sup>8</sup>

SOP tahun 2017 Kepala Dinas Sosial Kota Malang menetapkan keputusan tentang “Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Sosial Kota

---

<sup>7</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: MedPress, 2008), hlm: 204

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Putri selaku staff Dinas Sosial Kota Malang pada tanggal 24 April 2018

Malang.” Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Malang memunculkan 4 poin penting.<sup>9</sup>

KESATU :Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Sosial Kota Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran Kepala Dinas ini.

KEDUA :Standar Operasional Prosedur pada Dinas Sosial Kota Malang terdiri dari 20 poin yaitu:

1. Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) oleh Lemabaga Kesejahteraan Sosial/Badan Sosial/Kepanitiaan;
2. Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Harmoni Kota Malang;
3. Pelayanan Pengurus Balita Terlantar;
4. Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal;
5. Rekomendasi Pendirian/Perpanjangan Organisasi Soaial;
6. Rekomendasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
7. Legalisasi Perintis Kemerdekaan, Janda/Duda Perintis Kemerdekaan;
8. Rekomendasi Rawat Jalan/Rawat Inap di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang bagi Orang Terlantar/T4 (tempat tinggal tidak tetap);
9. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB);
10. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
11. Razia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;

---

<sup>9</sup> SOP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

12. Pemberian Bantuan Terhadap Korban Bencana Alam;
13. Pencairan Surat Pertanggung Jawaban Keuangan;
14. Rekomendasi Adopsi Anak;
15. Rekomendasi Jaminan Persalinan;
16. Rekomendasi SPM;
17. Surat Keluar;
18. Surat Masuk
19. Permintaan Data;
20. Penelitian Mahasiswa.

KETIGA :Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA wajib dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Sipil pada Dinas Sosial Kota Malang.

KEEMPAT :Keputusan Kepala Dinas Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Sesuai dengan SOP Dinas Sosial Kota Malang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Malang ada 20 poin SOP. Peneliti akan menjelaskan hanya satu poin saja yaitu tentang SOP Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Peneliti hanya menjelaskan satu poin tersebut karena fokus peneliti hanya pada gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan Pengemis tersebut masuk dalam salah satu kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). SOP Penanganan PMKS ini memiliki 6 dasar hukum yaitu:<sup>10</sup>





---

<sup>10</sup> SOP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sebenarnya 6 dasar hukum diatas adalah pedoman dasar hukum untuk membuat SOP di Dinas Sosial Kota Malang. 20 poin yang sudah disebutkan peneliti diatas tadi dasar hukumnya semuanya ada 6 seperti diatas tersebut. Ada 3 tahap Prosedur Pelayanan Informasi di Dinas Sosial Kota Malang, yaitu: Input - Pelaksanaan - Output.

Berikut adalah tabel 5.1 Prosedur Pelayanan Informasi:

No.	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Laporan dari Masyarakat		 		Pemohon menelfon ke Dinas Sosial	5 menit	Berita dari telfon	
2	Petugas Dinsos menuju Lokasi				Kendaraan	20 menit	Identifikasi	
3	Di rujuk ke panti sesuai dengan permasalahan				Surat rujukan dari Dinas Sosial	15 menit	Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Umum Saiful Anwar, Panti Rehabilitasi Sosial	
4	PMKS di kembalikan kepada keluarga				Bantuan Kendaraan Operasional		PMKS kembali ke keluarga	

Sumber: SOP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

Dari tabel di atas peneliti bisa menyimpulkan bahwa jika ada laporan dari masyarakat terkait tentang PMKS, maka masyarakat bisa langsung laporan ke Dinas Sosial Kota Malang melalui telepon atau bisa langsung datang ke kantor. Setelah melapor kepada Dinas Sosial maka akan dilakukan tinjauan terhadap masalah yang dilaporkan tadi langsung di tinjau ke lokasi sesuai dengan laporan. Tinjauan langsung ke lokasi ini untuk mengidentifikasi masalah yang ada di lokasi. Setelah proses identifikasi selesai maka pihak Dinas Sosial akan melakukan rujukan untuk pemohon sesuai dengan masalah yang dilaporkan.



Setelah pemohon ditangani oleh pihak rumah sakit atau pihak panti rehabilitasi sosial, maka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tersebut dikembalikan ke keluarganya dengan di bantu oleh Dinas Sosial Kota Malang.

Adanya SOP di Dinas Sosial Kota Malang maka sudah jelas struktur atau alur kerja para pegawai Dinas Sosial Kota Malang. SOP juga membantu menjelaskan pekerjaan pegawai Dinas Sosial sesuai dengan bidang masing-masing, maka tidak akan terjadi bentrok tugas antar bidang.

#### **5.4.2 Fragmentasi**

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi." Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan karena banyaknya birokrasi yang terlibat dalam program kerja.

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik (Budi Winarno,2005:153-154):

"Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk."

”Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.”

Pelaksanaan program kerja Desaku Menanti ini sendiri menurut peneliti

tidak terlalu banyak birokrasi yang ikut serta dalam melaksanakan jalannya program kerja ini. Terbukti hanya Dinas Sosial Kota Malang yang menjalankan program kerja Desaku Menanti ini yang dibantu oleh instansi Pemerintahan Kota Malang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa. Instansi Pemerintahan Kota Malang khususnya Dinas Sosial Kota Malang adalah instansi yang diberikan wewenang untuk menjalankan program kerja ini dan diberikan wewenang untuk meninjau langsung ke lapangan setiap harinya.

Dinas Sosial Kota Malang membuat agenda tugas untuk para pegawainya yang ditugaskan secara langsung untuk turun ke desa dengan tujuan meninjau langsung perkembangan masyarakat di desa. Adapun instansi pemerintahan yang turun langsung ke desa untuk membantu masyarakat desa mengatasi masalah yang dihadapinya. Contohnya Dinas Kesehatan Kota Malang yang langsung turun ke desa untuk memeriksa kesehatan seluruh penduduk desa. Dinas Kesehatan Kota Malang turun langsung ke desa hanya jika mendapatkan laporan dari Dinas Sosial Kota Malang untuk diminta memeriksa kesehatan penduduk desa. Jika tidak ada laporan dari Dinas Sosial Kota Malang, maka Dinas Kesehatan Kota Malang tidak turun langsung ke desa.

### 5.5 Proses Seleksi Penduduk Desa Program Kerja “Desaku Menanti”

Tidak semua gelandangan dan pengemis yang bisa menempati rumah di desa tersebut. Pihak Dinas Sosial Kota Malang mengadakan seleksi terhadap keluarga yang dahulunya terkena razia di jalanan. Seleksi ini dilakukan oleh LSM Mutiara Insani beserta Tim Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang yang mana data tersebut sudah teridentifikasi awal dari razia PMKS Jalanan di Kota Malang<sup>11</sup>. LKS Mutiara Insani beserta Tim Pekerja Sosial mendatangi secara langsung ke rumah calon penerima program kerja “Desaku Menanti” tersebut.

Seleksi langsung turun kerumah calon penerima tersebut dilakukan pada tanggal 12, 16, dan 17 Februari dilaksanakanlah tahap seleksi ini. Adapun prioritas-prioritas yang di pilih oleh Dinas Sosial Kota Malang untuk menempati rumah dan menerima bantuan yang diberikan oleh pihak Pemerintahan Kota Malang. Berikut prioritas dari Dinas Sosial Kota Malang:<sup>12</sup>

- a. Prioritas Utama: Warga Kota Malang, Pengemis, Produktif, Tidak Memiliki Tempat Tinggal Tetap/Sewa/Kontrak, kemauan untuk berubah dan kesediaan mengikuti program.

---

<sup>11</sup> Dinsos. “Seleksi Program Desaku Menanti.” [www.dinsos.malangkota.go.id](http://www.dinsos.malangkota.go.id). (diakses pada tanggal 26 April 2018 pukul 00.52 WIB)

<sup>12</sup> *Ibid*

- b. Prioritas Kedua: Warga Kota Malang ,Pemulung/Diluar PMKS tapi Miskin, Produktif, Tidak Memiliki Tempat tinggal tetap/Sewa/Kontrak , Kemauan Berubah , Kesiwaan Mengikuti Program

Kampung Topeng berdiri karena Program Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan Terpadu Melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga Berorientasi Desa atau bisa disebut "Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial." Program tersebut guna mengembangkan model penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan, agar hilang secara permanen di kota-kota besar. Program ini adalah inovasi dari program penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang selama ini dilakukan, yaitu dengan memfokuskan semua layanan di daerah asal para gelandangan dan pengemis berbasis desa. Di samping itu, semua kegiatan akan melibatkan seluruh komponen di daerah asal, seperti pemerintah daerah, pengusaha (CSR), LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat. Berikut adalah daftar nama-nama Kepala Keluarga Warga Binaan Sosial Program Kerja Desaku Menanti Kota Malang Tahun 2018:

Tabel 5.2 Daftar Nama Penduduk Desaku Menanti

NO.	NAMA KEPALA KELUARGA
1.	Kartini
2.	Karti
3.	Siti Rohma
4.	Siti Maimunah
5.	Suprapti
6.	Muji Hadi
7.	Sunarti
8.	Sarjuki
9.	Suyanto
10.	Wiji Cholifah
11.	Siti Ningsih
12.	Aminah

13.	Rondang Ulfiah
14.	Heri Siswanto
15.	Fera Yulianti
16.	Siska Damayanti
17.	Suwito
18.	Andik
19.	Agung Setiawan
20.	Agus Kasianto
21.	Santuri
22.	Heri Rusdiatno
23.	Warsiatin
24.	Sumiati-Sukun
25.	Komariah
26.	Syaiful Bukhori
27.	Bambang
28.	Misno
29.	Slamet
30.	Sumiati-Muharto
31.	Kustiari
32.	Yuliatiningtya
33.	Ismi Harfiah
34.	Mulyono
35.	Rupinah

*Sumber: Data olahan peneliti tahun 2018*

Pada tahun 2017 jumlah Kepala Keluarga di Desaku Menanti ini sejumlah 40 KK. Tetapi dengan seiringnya berjalannya waktu ada saja keluarga yang tidak betah tinggal di desa tersebut dengan alasan lokasi desa yang jauh dari pusat keramaian kota dan tidak ada pekerjaan yang tetap. Melihat banyak rumah yang kosong di Desaku Menanti. Akhirnya peneliti mendata secara langsung menuju rumah penduduk Desaku Menanti satu-persatu. Pendataan peneliti langsung ke rumah masing-masing bertujuan untuk memastikan berapa Keluarga yang masih tinggal di Desaku Menanti. Setelah melakukan pendataan secara langsung ke rumah masing-masing penduduk Desaku Menanti, peneliti mendapatkan hanya ada 35 KK saja yang masih tinggal di Desaku Menanti.

Inti dari program ini adalah menciptakan keteraturan sosial melalui peningkatan kontrol sosial dari masyarakat. Mereka (gelandangan, pengemis dan anak jalanan) yang berpandangan bahwa dengan menggelandang mereka bisa memperoleh uang tanpa harus bekerja keras. Menariknya lagi, mereka justru memanfaatkan layanan panti-panti maupun layanan transmigrasi sebagai suatu 'selingan hidup' dimana mereka bisa numpang makan minum gratis di panti dan pindah dari satu panti ke panti lainnya manakala bosan, dan hal inipun diorganisir oleh kelompok gelandangan sendiri dengan baik. Bagi yang bertransmigrasi mereka juga kembali setelah menjual tanah dan rumahnya ke tetangganya maupun ke penduduk setempat. Fenomena itulah yang ingin dihapus oleh Kementerian Sosial melalui program Desaku Menanti.

Koordinator Kampung Topeng, Hadi mengatakan dikumpulkannya para warga yang mayoritas mencari uang dari jalanan ini setelah diberi binaan selama 3 bulan dan jaminan hidup dari Menteri Sosial (Mensos), setiap Kepala Keluarga (KK) mendapat modal Rp 5 juta dan uang jaminan hidup 9 juta rupiah. Tapi ada aturan yang mengatakan bila ada yang hanya pikirannya untuk mencari uang saja dari Kampung Topeng, akan ditindak tegas oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas Sosial.

"Banyak warga sini yang datang waktu pembagian uang atau sembako saja, lalu pergi lagi. Itu jelas sedikit banyak bisa mempengaruhi warga lain, seperti kecemburuan sosial antar warga akan sering muncul kalau seperti itu. Saya ingin ada ketegasan dari pemerintah sini terkait warga yang bandel," ujar Hadi kepada MALANGTIMES.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Hendra Saputra. "Kampung Topeng, Ubah Wajah Kota Malang Bersih dari Gelandangan." [www.malangtimes.com](http://www.malangtimes.com). (diakses pada tanggal 26 April 2018 pukul 00.34 WIB)

Adanya Kampung Topeng membuat warga daerah Baran, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Daerah tersebut dulunya jarang dilewati orang karena selain jalan yang tidak beraspal, juga tidak ada penerangan di sepanjang jalan menuju daerah Baran.

"Tapi memang semenjak ada Kampung Topeng ini, kampung atas dan bawah jadi rukun, soalnya dulunya ada kerenggangan antara warga sini. Sekarang jalannya sudah enak, lampu terang dan juga kalau malam ada yang ronda, biar warga merasa aman kalau lewat daerah sini," terang Hadi<sup>14</sup>.

Tidak hanya itu, kegiatan di Kampung Topeng untuk mempererat hubungan antar warga sudah dilakukan oleh Hadi. Karena menurut pria yang mempunyai 6 anak ini, harmonisasi bertetangga sangat penting guna menumbuhkan bersama kampung yang berada ditanjakkan ini.

"Di sini juga ada kegiatan dari bapak-bapak, guna mempererat hubungan antar warga. Yang ibu-ibu juga ada pengajian. Dan tak lupa kami warga sini juga menggelar ronda malam yang sudah terjadwal," ucap Hadi.<sup>15</sup>

Kegiatan warga sehari-hari diantaranya ada yang parkir, ibu-ibu jualan di depan dan warga membuat kreasi sendiri untuk oleh-oleh dari Kampung Topeng. Keberadaan Kampung Topeng sedikit banyak mengurangi angka gelandangan di Kota Malang. Dengan adanya program Desaku Menanti itu juga, para gelandangan bisa hidup layak dan mendapatkan lapangan pekerjaan. Dengan begitu Kota Malang terlihat bersih dan rapi. Data yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian langsung ke lapangan ada 35 Kepala Keluarga yang tinggal

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> *Ibid.*,



di Desa tersebut. Kepala Keluarga semuanya bekerja sebagai wirausaha atau membuka usaha sendiri seperti menjual roti, menjual telur asin, menjual kripik-kripik, menjual kopi dan gorengan keliling jalanan Kota Malang, menjual bakso, menjual bahan-bahan sembako dan rokok.

Sesuai dengan perkembangan di desa sekarang yang awalnya hanya sebuah desa eks gelandangan dan pengemis sekarang desa tersebut menjadi Desa Wisata 1000 topeng. Desa tersebut sekarang menjadi desa wisata banyak pengunjung dari berbagai kota yang datang ke desa tersebut. Dengan ikon desa tersebut yaitu 2 buah Topeng khas Malangan berukuran besar dengan diameter 3 meter dan tinggi 7 meter. Banyak dari pengunjung yang foto-foto di depan topeng tersebut. Tidak hanya topeng berukuran raksasa saja yang banyak diminati pengunjung, akan tetapi deretan topeng-topeng kecil didekat topeng raksasa tersebut juga diminati banyak pengunjung untuk foto-foto di sekitar topeng tersebut.

Selain topeng-topeng yang terpasang rapi di sekitar taman desa tersebut. Pengunjung juga dapat membuat atau belajar membuat topeng khas Malangan. Di Desa sudah disediakan tempat untuk pengunjung membuat topeng khas malangan ini. Tidak hanya membuat pengunjung juga bisa mewarnai topeng-topeng kecil yang sudah disediakan oleh penduduk desa. Hanya dengan cukup membayar 10 ribu rupiah pengunjung sudah bisa membuat topeng atau mewarnai topeng kecil-kecil tersebut. Pengunjung juga bisa membawa pulang topeng tersebut yang sudah jadi dengan biaya mulai dari 15-20 ribu rupiah saja.

Jangan khawatir untuk pengunjung yang suka dengan alam karena di desa sekarang sudah disediakan permainan khusus anak-anak dan khusus orang dewasa. Permainan khusus anak-anak ini meliputi taman bermain anak-anak seperti ayunan, jungkat-jungkit dan perosotan. Sedangkan area bermain untuk orang dewasa disediakan seperti tempat *outbond* dan *flyingfox* juga. Untuk membuat topeng dan mewarnai topeng dibuka untuk semua umur. Semuanya akan didampingi oleh ahlinya entah itu membuat topeng atau melukis topeng, jadi aman bagi anak kecil maupun orang dewasa.

#### **5.6 Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Program Kerja “Desaku Menanti” dan Penyelesaiannya**

Dalam sebuah pelaksanaan program kerja atau rencana pasti menemui hambatan-hambatan yang bisa mempersulit jalannya pelaksanaan program kerja tersebut. Hambatan-hambatan inilah yang harus diselesaikan oleh aktor-aktor yang ada dalam perencanaan program kerja. Jika hambatan-hambatan tidak segera diselesaikan maka tidak menutup kemungkinan suatu program kerja akan mengalami kegagalan dan tidak dapat dijalankan sesuai dengan rencananya. Tidak lepas dari hambatan program kerja “Desaku Menanti” juga mengalami hambatan-hambatan sebelum memulai program kerja maupun selama proses menjalankan program kerja tersebut. Peneliti akan menjelaskan hambatan apa saja yang ditemui oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam menjalankan program kerja “Desaku Menanti” ini.

### **5.6.1 Hambatan Sebelum Pembangunan Perumahan untuk Warga Binaan Dinas Sosial Program Kerja “Desaku Menanti”**

Sebelum adanya pembangunan perumahan untuk warga binaan sosial program kerja “Desaku Menanti” ada proses pencarian lahan untuk pembangunan perumahan ini. Proses pencarian lokasi pembangunan ini mengalami hambatan-hambatan yang sangat serius. Pencarian lokasi pembangunan lokasi perumahan ini pindah tempat sampai tiga kali. Lokasi itu ada di daerah Wonokoyo, Pandanwangi dan Arjowinangun. Dinas Sosial Kota Malang mengadakan sosialisasi terhadap penduduk asli ketiga daerah tersebut tentang program kerja “Desaku Menanti.” Setelah melakukan sosialisasi program kerja ini Dinas Sosial Kota Malang mendapatkan penolakan pembanguan perumahan untuk gelandangan dan pengemis.

Penolakan ini bukan tanpa sebab dan alasan dari penduduk asli. Alasan dari ketiga tempat tersebut hampir sama semuanya. Penduduk asli menolak adanya pembangunan perumahan untuk gelandangan dan pengemis dikarenakan mereka takut adanya dampak negatif dari program kerja ini. Melihat latar belakang penduduk pendatang yang akan menempati rumah-rumah ini adalah gelandangan dan pengemis. Penduduk asli Wonokoyo, Pandanwangi dan Arjowinangun merasa resah dan tidak nyaman jika daerah asalnya ada perumahan khusus orang-orang yang mempunyai latar belakang yang tidak baik. Mereka takut keamanan lingkungan mereka menjadi tidak aman atau tidak harmonis dengan adanya pendatang baru yang kurang memiliki nilai moral yang baik. Selain penilakan dari penduduk asli daerah tersebut pihak Dinas Sosial Kota

Malang juga merasa lahan yang ada kurang memadai untuk dijalankannya program kerja ini.

Setelah mendapatkan penolakan di tiga tempat tersebut. Akhirnya Dinas Sosial Kota Malang mensosialisasikan dan meminta izin terhadap penduduk asli Desa Baran. Dinas Sosial Kota Malang menjelaskan dampak positif apa yang bisa dirasakan oleh penduduk asli Desa Baran. Dampak positif yang bisa dirasakan oleh penduduk asli yaitu mereka bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di Desaku Menanti. Selain mereka bisa ikut serta dalam acara di Desaku Menanti, penduduk asli Desa Baran juga akan ikut serta untuk mengelola desa tersebut. Program kerja “Desaku Menanti” ini mempunyai tujuan salah satunya adalah membuat Desaku Menanti menjadi Desa Wisata. Selain itu Desa Baran juga akan dibangun akses jalan raya yang lebih baik lagi dan mendapatkan penerangan jalan raya sehingga jika keluar malam jalan raya Desa Baran mempunyai penerangan yang memadai.

Setelah pihak Dinas Sosial Kota Malang melakukan sosialisasi terhadap penduduk asli Desa Baran dan menjelaskan dampak positif apa saja yang akan dirasakan oleh penduduk asli Desa Baran. Akhirnya mereka pun mengizinkan adanya pembangunan untuk perumahan eks gelandangan dan pengemis serta melaksanakan program kerja “Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial.” Hambatan tidak selesai di perijinan kepada penduduk asli saja masih ada hambatan-hambatan lainnya yang ditemui oleh Dinas Sosial Kota Malang. Hambatan ini yaitu kondisi jalan raya menuju Desa Baran sangat buruk sekali dan penerangan jalan raya jika malam hari sangat gelap penerangan hanya ada di

rumah penduduk masing-masing dan penerangan dari kendaraan bermotor yang lewat jalan tersebut. Selain itu penunjuk arah untuk menuju Desa Baran juga tidak ada sehingga membingungkan bagi pihak Dinas Sosial Kota Malang atau instansi pemerintahan jika ingin berkunjung ke desa tersebut.

Seiring berjalannya program kerja Desaku Menanti ini masalah demi masalah terselesaikan. Saat ini kondisi jalan raya menuju Desaku Menanti sudah sangat bagus sekali tidak ada jalanan berlubang lagi. Penerangan di malam hari juga sudah cukup memadai saat ini sudah ada penerangan jalan raya di malam hari sehingga jika malam datang jalan raya tidak terlalu gelap seperti awal sebelum di adakan program kerja ini. Sekarang Desaku Menanti sudah menjadi Desa Wisata Topeng. Jadi untuk pengunjung yang ingin melihat Desa ini tidak perlu khawatir lagi karena sekarang sudah ada penunjuk jalan menuju Desa Wisata Topeng ini.

#### **5.6.2 Hambatan Pelaksanaan Program Kerja “Desaku Menanti” dan Penyelesaiannya**

Selama pelaksanaan program kerja “Desaku Menanti” Dinas Sosial Kota Malang menemukan hambatan-hambatan yang berasal dari penduduk eks gelandangan dan pengemis tersebut. Masalah yang dihadapi Dinas Sosial Kota Malang ini yaitu kurangnya pendidikan warga binaan sosial ini dan minimnya pendapatan penduduk Desaku Menanti. Setelah mengetahui faktor apa saja yang membuat warga Desaku Menanti ini ada yang tidak betah tinggal lebih lama lagi di Desaku Menanti. Mereka tidak betah tinggal lebih lama lagi di desa tersebut dikarenakan pendapatan mereka yang sangat minim dan tidak menentu. Sesuai

hasil wawancara peneliti dengan Ibu Kustiari salah satu penduduk desa yang sampai sekarang masih betah tinggal di Desa tersebut.<sup>16</sup>

“...Betah atau tidak ya dibetah-betahkan mas. Jujur kalau masalah penghasilan lebih banyak saya turun ke jalanan untuk mengemis dari pada di sini perhari paling-paling cuman 10rb itupun kalau ada yang beli jualan saya. Kalo ga ada yang beli ya sudah kita makan seadanya. Kalau ngemis di jalanan sehari bisa dapat 50rb an. Cuman saya betah tinggal disini soalnya rumah ga usah bayar lagi, listrik air ga usah bayar lagi ada enak dan ga enaknya tinggal disini mas”

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan Ibu Kustiari, peneliti menjadi tahu faktor apa saja yang membuat penduduk binaan sosial ini tidak ingin tinggal lebih lama lagi di Desaku Menanti ini. Pihak Dinas Sosial Kota Malang sendiri menyadari kalau pendapatan penduduk Desaku Menanti sangat minim sekali. Maka dari itu Dinas Sosial Kota Malang sering memberikan bantuan-bantuan sembako maupun mengadakan sebuah acara untuk menarik masyarakat lainnya agar mempunyai keinginan berkunjung ke Desaku Menanti. Selain itu Dinas Sosial Kota Malang juga ikut membantu menjualkan hasil olahan produk Desaku Menanti. Hasil produk Desaku Menanti ini berupa Kripik Peyek Tempe, Kue Bunga dan Kue Stick Keju. Pegawai Dinas Sosial Kota Malang yaitu Bapak Arip adalah yang selalu memasarkan dagangan penduduk Desaku Menanti ke instansi-instansi pemerintahan di Kota Malang. berikut petikan wawancara peneliti dengan Bapak Arip:<sup>17</sup>

“...Kalau aku mas di Dinas Sosial Kota Malang ini sebagai Supir saja dulu saya megang mobil Hailux itu mobil khusus razia saja. Razia anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang gila semacam itu mas. Tapi kalau sekarang aku tetap jadi supir cuman ada tugas tambahan dari Ibu Dinas aku disuruh

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dari Ibu Kustiari salah satu penduduk dari Desaku Menanti pada tanggal 25 januari 2017 pukul 14.00 WIB

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arip selaku staff Dinas Sosial Kota Malang bagian Transportasi pada tanggal 11 April 2018 pukul 10.27 WIB

memasarkan dagangan hasil penduduk Desaku Menanti ke Dinas-Dinas lainnya di Kota Malang ya itung-itung ikut membantu penduduk Desa mas”

Hambatan lainnya selama proses pelaksanaan program kerja ini yaitu sulitnya merubah *mindset* atau pikiran dari penduduk Desaku Menanti itu sendiri. Menurut Ibu Putri selaku staff fi Dinas Sosial Kota Malang bagian Pekerja Sosial. Masalah yang sampai saat ini belum teratasi 100% yaitu merubah pola pikir penduduk Desaku Menanti itu sendiri. Karena selama ini pihak Dinas Sosial Kota Malang sudah mencoba merubah pola pikir penduduk Desaku Menanti yang awalnya pola pikir mereka hanya untuk uang dan uang jarang memikirkan kehidupan rohaninya. Untuk mengatasi masalah tersebut dari pihak Dinas Sosial Kota Malang sudah melakukan pendekatan pendampingan secara langsung ke setiap warga Desaku Menanti. Dinas Sosial Kota Malang dalam masalah ini dibantu oleh LKS Mutiara Insani. Mereka melakukan pendampingan setiap hari di setiap rumah. Tidak hanya Dinas Sosial Kota Malang dengan LKS Mutara Insani saja yang melakukan pendampingan, kan tetapi dari penduduk asli Desa Baran juga membantu dari segi keagamaan. Salah satu contohnya adalah diadakan ngaji untuk anak-anak maupun dewasa yang guru ngajinya berasal dari penduduk asli Desa Baran yang sekaligus menjabat sebagai salah satu Pak RW di Desa Baran. Alhasil sampai saat ini masih belum ada perubahan yang mencolok dari penduduk Desaku Menanti.

Cara lain Dinas Sosial Kota Malang mensosialisasikan Desa Wisata Topeng ini adalah dengan cara mengadakan acara atau pertunjukan di Desaku Menanti. Pertunjukan yang baru saja dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Malang



yaitu pertunjukan Barongsai dan Jaranan. Pertunjukan seni ini dilaksanakan pada tanggal 23 April 2018. Siang itu Kampung Topeng Desaku Menanti lebih ramai dari biasanya. Ini disebabkan sedang diselenggarakannya acara kesenian Jaranan dan Rampak Barong yang dipunggawai oleh salah satu warga Kampung Topeng yaitu Bapak Sandi Koesbiantoro. Hal ini membuat Kampung Topeng menjadi pusat perhatian sehingga banyak warga sekitar bahkan dari luar daerah ingin menyaksikan pagelaran tersebut. Adanya pagelaran ini Baak Sandi sangat senang sekali karena menurut beliau dengan diadakan pagelaran ini bisa membantu memberikan pendapatan tambahan warga Desaku Menanti ini khususnya bagi Bapak Sandi sendiri karena bapak Sandi salah satu yang bermain dalam acara ini.

Gambar 5.1  
Foto pertunjukan Seni Barongan dan Seni Jaranan di Desaku Menanti



Semakin siang, ternyata Kampung Wisata Topeng ini diguyur hujan lebat, akan tetapi tidak menyurutkan mental penonton dan pemain. Bahkan tidak ada

yang mengira, yang harusnya hanya 15 Barong yang bermain, ternyata para teman-teman barong yang lain dari berbagai daerah di Malang Raya ikut datang untuk berpartisipasi untuk ikut memeriahkan acara tersebut. Lebih dari 40 barong beraksi satu persatu hingga diakhir pagelaran seluruh barong berkumpul jadi satu di tengah lapangan berebut sesajen yang dibakar.

Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka untuk lebih memperkenalkan Kampung Wisata Topeng ke khalayak ramai dan bisa tersebar keseluruh Malang Raya bahwa di Kampung Wisata Topeng terdapat pagelaran-pagelaran seru yang akan segera diagendakan setiap bulannya. Selain Jaranan dan Rampak Barong, nantinya akan diselenggarakan pula Pagelaran Tari Topeng Malangan, dan juga acara-acara hiburan lainnya yang akan memanjakan para wisatawan ketika berkunjung kesana. Dengan diadakan acara pertunjukan seperti ini Dinas Sosial Kota Malang berharap agar ada pendapatan tambahan untuk warga Desaku Menanti. Dengan adanya Kampung Wisata Topeng ini menambah tempat wisata di Kota Malang dan menambah daya tarik masyarakat luar Kota Malang untuk berkunjung ke Kota Malang.

### **5.7 Hasil Penanganan Masalah di Desaku Menanti**

Dinas Sosial Kota Malang menemukan beberapa masalah yang ada di Desaku Menanti. Masalah ini yaitu, tidak adanya petunjuk jalan untuk menuju ke Desa, permasalahan akses jalan raya yang kurang baik menuju desa, kurangnya pengetahuan atau rendahnya pendidikan penduduk di Desaku Menanti dan minimnya pendapatan penduduk Desaku Menanti. Untuk menangani masalah diatas Dinas Sosial tidak bekerja sendirian saja, akan tetapi dibantu oleh instansi

pemerintah lainnya seperti Dinas PU (Pekerja Umum). Tidak hanya dengan instansi pemerintahan saja Dinas Sosial juga bekerja sama dengan IAI dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Hasil dari kerja sama Dinas Sosial dengan mitra kerjanya untuk menangani masalah yang ada di Desaku Menanti ini yaitu:

1. Sudah ada petunjuk jalan untuk menuju desa yang sekarang menjadi Desa Wisata.
2. Akses jalan raya menuju desa sekarang menjadi lebih baik lagi tidak ada jalanan berlubang.
3. Penduduk Desaku Menanti mendapatkan pendidikan yang layak khususnya untuk anak-anak yang masih menginjak usia sekolah.
4. Bertambahnya pendapatan penduduk Desaku Menanti dikarenakan sekarang desa tersebut menjadi Desa Wisata.

Menjadi Desa Wisata mempunyai dampak positif bagi para penduduk Desaku Menanti. Penduduk Desaku Menanti sekarang mempunyai tambahan pendapatan dari para wisatawan yang datang berkunjung atau membeli oleh-oleh dari Desaku Menanti tersebut. Desaku Menanti sekarang dilengkapi dengan fasilitas *outbond* yang didanai oleh Bank BNI.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

*Pertama*, program kerja “Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial” ini berawal dari program kerja yang disusun oleh Kementerian Sosial RI yang bekerja sama dengan Pemerintahan Kota Malang. Program kerja ini bertujuan untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di jalanan Kota Malang sesuai dengan program kerja dari Gubernur Jawa Timur yang ingin memprioritaskan 5 PMKS di Jawa Timur. Selain untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Malang. Program kerja ini bertujuan juga untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat khususnya para gelandangan dan pengemis. Pada akhirnya program kerja ini dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Malang yang dibantu oleh seluruh instansi Pemerintahan Kota Malang sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa. Letak desa ini ada pada Desa Baran, Kecamatan Tlogowaru, Kota Malang. Lahan kosong yang ada di Dusun Baran ini dikembangkan oleh Pemerintah Kota Malang untuk dijadikan sebuah desa khusus menampung para gelandangan dan pengemis yang sudah diseleksi oleh LKS Mutiara Insani beserta Tim Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang.

*Kedua*, Dinas Sosial Kota Malang sejauh ini sudah sangat baik untuk menjalankan program kerja ini. Perkembangan yang semakin lama semakin membaik dirasakan peneliti secara langsung. Mulai dari kondisi desa sendiri mengalami perkembangan pembangunan yang cukup drastis. Akses jalan yang awalnya sangat sulit dijangkau oleh kendaraan roda dua maupun roda empat,

sekarang jadi mudah diakses kendaraan bermotor apapun. Selain itu perkembangan kehidupan sosial penduduk di desa tersebut juga mengalami perubahan mulai dari psikologinya maupun dari segi pekerjaan. Sekarang di desa tersebut rata-rata mereka bekerja sebagai wirausaha. Segi pendidikan untuk anak-anak di desa tersebut juga semakin membaik, karena sekarang seluruh anak usia pelajar di desa tersebut sudah bersekolah semua. Perubahan yang positif ini tidak lepas dari baiknya Dinas Sosial Kota Malang beserta pihak yang membantunya dalam menjalankan tugasnya. Tidak hanya itu saja perubahan ini juga tidak terlepas dari para pihak mitra kerja atau donatur yang membantu Dinas Sosial Kota Malang untuk menjalankan program kerja tersebut.

*Ketiga*, implementasi program kerja menurut Edward mempunyai 4 variable yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Keempat variable tersebut menurut peneliti untuk melihat kesiapan aktor-aktor untuk menjalankan suatu program kerja. Kementerian Sosial RI, Pemerintah Kota Malang dan Dinas Sosial Kota Malang menurut peneliti adalah aktor utama dalam menjalankan program kerja “Desaku Menanti Kampung Kesejahteraan Sosial.” Ketiga aktor tersebut yang mempunyai peran penting dalam menjalankan program kerja ini khususnya pihak Dinas Sosial Kota Malang yang banyak menjalankan program kerja ini. Dibantu dengan instansi lainnya termasuk Dinas Kesehatan Kota Malang, Dinas Kependudukan Kota Malang, Dinas Pendidikan Kota Malang dan Satpol PP Kota Malang yang pernah membantu melancarkan program kerja ini. Tidak lupa juga untuk IAI, LKS Mutiara Insani, Tim Pekerja Sosial, PLN, PDAM dan Bank yang juga membantu pihak Dinas Sosial Kota Malang untuk

menjalankan program kerja “Desaku Menanti”. Selain dari instansi pemerintahan ada juga Bank Jatim yang memberikan bantuan untuk pembangunan tempat *outbond* dan lahan parkir di desa.

*Keempat*, Masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang ada di Program Kerja Desaku Meananti ini semuanya hampir bisa diselesaikan oleh pihak Dinas Sosial Kota Malang. Hanya merubah pola berpikir dari penduduk Desaku Menanti yang hanya memikirkan uang dan uang untuk dirubah agar memikirkan masalah keagamaan yang kurang mengalami perubahan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti mempunyai saran-saran yang dapat direkomendasikan Dinas Sosial Kota Malang untuk kepentingan bersama, sebagai berikut:

1. Disarankan untuk menambah jumlah Kepala Keluarga gelandangan dan pengemis yang akan dibina di Desaku Menanti, karena peneliti melihat masih ada rumah kosong di desa tersebut.
2. Lebih baik lagi jika ada kerjasama dengan pihak tertentu untuk memasarkan hasil produk olahan penduduk desa.
3. Peneliti mengharapkan lebih dimudahkan akses jalan untuk menuju ke desa tersebut. Dengan kata lain diberi petunjuk arah untuk menuju ke desa tersebut.
4. Peneliti berharap ada peneliti-peneliti lainnya yang membahas tentang program kerja “Desaku Menanti” ini agar semakin dikenal di kalangan mahasiswa.

5. Sosialisasi “Desaku Menanti” lebih ditingkatkan lagi seperti membagikan poster-poster supaya lebih banyak lagi pengunjung yang datang ke desa.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Wahab Abdul. 2011. *Analisis Kebijakan Publi.*, Malang: UMM Press.

Winarno Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress.

Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Faisal Sanapiah. 1995. *Format-format penelitian sosial*. Jakarta: PT RajaGrafinso Persada.

Edward III George. 1978. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prantice Hall.

Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Arikunto Suharsimi. 2006. *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ghony M. Djunaidi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar –Ruzz Media.

### Jurnal dan Skripsi:

Wati, Hikmah, 2016, *Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Lampung*, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Ahmad, Faizurah, 2014, *Efektifitas Kerja Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan*, (Skripsi), FISIP, Universitas Hasanudin.

Sudiyanti, iis, 2016, *Pemberdayaan Masyarakat (Gelandangan dan Pengemis) Dalam Bidang Keterampilan Pengolahan Kedelai di Panti Bina Karya Panghudi Luhur Bekasi*, (Skripsi), FISIP, UIN Jakarta.

Sultoni, Fadhlani, 2013, *Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program*, Skripsi, Program Intake STAR, Universitas Andalas.

Chitrasari, Nitha, 2013, *Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cilegon*, (Skripsi), FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Agustine, Riza, 2014, *Implementasi Upah Minimum Kota Pekanbaru Tahun 2013*, Jom FISIP, Vol. 1, No.2.

Aunu Rofiq, *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Ilmiah Pawiyatan, Vol.20, No. 1.

Patton dalam Amheru, Bab IV Teknik Pengumpulan Informasi (Data) 2015.

#### **Dokumen:**

Profil Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2014.

SOP Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017.

Daftar Nama Warga Binaan Program Desaku Menanti “Mutiaras Insani” Tahun 2017.

**Peraturan dan Undang-undang:**

UUD Tahun 1945 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 34(1).

UUD Tahun 1945 Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 27(2).

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Pasal 1 ayat (13).

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Malang tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017.

**Wawancara:**

Hasil Wawancara dengan Ibu Putri selaku staff pegawai Dinas Sosial Kota.

Malang bagian Gelandangan dan Pengemis, di Kantor Dinas Sosial Kota Malang. Pada Tanggal 7 Mei 2018.

Hasil Wawancara dengan Ibu Kustiari selaku salah satu penduduk di desa. Pada Tanggal 25 Januari 2017.

Hasil Wawancara dengan Ibu Sumiarti selaku salah satu penduduk di desa. Pada Tanggal 29 Januari 2017.

**Website:**

Humas Dinsos. "Struktur Dinas Sosial." *www.dinsos.malang.go.id*. (diakses pada tanggal 18 April 2018 pukul 08.50 WIB).

Dinsos.”Alamat Dinas Sosial.” <https://sosial.malangkota.go.id/> (diakses pada tanggal 18 April 2018 pukul 07.34 WIB).

Achmad.Maulidi.”Pengertian data primer dan data sekunder.” [www.kanalinfo.web.id](http://www.kanalinfo.web.id) (diakses pada tanggal 1 Desember 2017 pukul 13.27 WIB).

Bagian humas. “Program Desaku Menanti Kemensos Bantu Pembangunan 40 Rumah.” [www.humas.malangkota.go.id](http://www.humas.malangkota.go.id). (Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 17.56 WIB).

Dinsos. “Seleksi Program Desaku Menanti.” [www.dinsos.malangkota.go.id](http://www.dinsos.malangkota.go.id). (diakses pada tanggal 26 April 2018 pukul 00.52 WIB).

Hendra Saputra. “Kampung Topeng, Ubah Wajah Kota Malang Bersih dari Gelandangan.” [www.malangtimes.com](http://www.malangtimes.com). (diakses pada tanggal 26 April 2018 pukul 00.34 WIB).